

**ANALISIS IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DAN
STRUKTUR EKONOMI PULAU SUMATERA**

**OLEH
DEWI SAVITRI
H14084017**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008**

RINGKASAN

DEWI SAVITRI. Analisis Identifikasi Sektor Unggulan dan Struktur Ekonomi Pulau Sumatera. (dibimbing oleh TONY IRAWAN).

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor, perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang telah mengamanatkan dalam delapan misi pembangunan Indonesia kedepan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 telah ditetapkan bahwa untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi rencana tata ruang pulau/kepulauan yang disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan sektor ekonomi dan daya saing sektor-sektor ekonomi di Pulau Sumatera, menganalisis tingkat pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Pulau Sumatera terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan menentukan sektor unggulan di Pulau Sumatera dalam memprioritaskan pembangunan wilayah supaya dapat bersaing di perekonomian nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah data PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2000 – 2007 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan, demikian juga data PDB Indonesia tahun 2000 – 2007 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan, disertai dengan data-data sekunder lain yang relevan dengan tujuan penulisan skripsi ini.

Hasil dari penelitian ini adalah perekonomian Sumatera secara umum mengalami pertumbuhan yang pesat dan memiliki daya saing yang relatif tinggi serta arah pertumbuhan ekonomi sektor dominan di Pulau Sumatera sejalan dengan arah pertumbuhan sektor dominan ditingkat nasional. Secara sektoral, setidaknya ada empat sektor yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Melalui analisis shift share modifikasi Esteban-Marquillas diperoleh bahwa subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi adalah subsektor minyak dan gas bumi. Terdapat dua sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif di Pulau Sumatera, yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Kedua sektor ini merupakan sektor basis yang menandakan wilayah ini mampu memenuhi sendiri kebutuhannya disektor ini dan dimungkinkan untuk mengeksport keluar daerah. Sedangkan subsektor yang memiliki keunggulan subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya, subsektor kehutanan, subsektor perikanan, subsektor minyak dan gas bumi, subsektor penggalian dan subsektor pengangkutan serta subsektor pemerintahan umum.

**ANALISIS IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DAN
STRUKTUR EKONOMI PULAU SUMATERA**

Oleh

**DEWI SAVITRI
H14084017**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Departemen Ilmu Ekonomi

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

2008
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh:

Nama : Dewi Savitri
Nomor Registrasi Pokok : H14084017
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Identifikasi Sektor Unggulan dan Struktur
Ekonomi Pulau Sumatera

Dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Tony Irawan, M.App.Ec.
NIP. 132311724

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi

DR. Ir. Rina Oktaviani, M.S
NIP. 131846872

Tanggal Kelulusan:

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN

Bogor, September 2008

Dewi Savitri
H14084017

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dewi Savitri lahir pada tanggal 30 September 1978 di Sungai Selan (Bangka), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Achros Abbas dan Maimunah M. Noer (Alm). Penulis menamatkan sekolah dasar pada SD Negeri 6 Pangkalpinang dan lulus pada tahun 1985. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke SLTP Negeri 7 Pangkalpinang dan lulus pada tahun 1994. Tiga tahun kemudian pada tahun 1997 penulis menamatkan pendidikan menengah di SMU Negeri 1 Pangkalpinang.

Pada tahun 2000 penulis menamatkan pendidikan Diploma III di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) Jakarta dan setahun kemudian di tempat yang sama, penulis menamatkan pendidikan Diploma IV dengan gelar Sarjana Sains Terapan (SST). Sekarang penulis sedang melalui Program Pra-S2 (Matrikulasi/Alih Jenjang S1) sebagai salah satu syarat melanjutkan studi di Sekolah Pasca Sarjana Mayor Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penentuan Sektor Unggulan Ekonomi Pulau Sumatera”**. Skripsi ini merupakan laporan tugas akhir Program Pra-S2 (Matrikulasi/Alih Jenjang S1) sebagai salah satu syarat melanjutkan studi di Sekolah Pasca Sarjana Mayor Ilmu Ekonomi IPB.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Drs. H. Syafril, selaku Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan sekolah di IPB.
2. Dr. Ir. Rina Oktaviani, M.S., selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi.
3. Tony Irawan, M.App.Ec. dan Widyastutik, M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan arahan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Seluruh dosen Matrikulasi Program Pra-S2 dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis pribadi dan semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, September 2008

Dewi Savitri
H14084017

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	8
2.1. Definisi Pembangunan	8
2.2. Teori Pembangunan Daerah	9
2.3. Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan.....	11
2.4. Teori Basis Ekonomi.....	12
2.5. Konsep Analisis <i>Shift-Share</i>	13
2.6. Konsep Analisis <i>Location Quotient</i>	15
2.7. Penelitian Terdahulu.....	17
2.8. Kerangka Pemikiran	18
III. METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1. Jenis dan Sumber Data	21
3.2. Metode Analisis <i>Shift-Share</i>	21
3.3. <i>Location Quotient</i> (LQ).....	28
3.4. Definisi Operasional Variabel	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Kondisi Perekonomian	33
4.1.1. Struktur Ekonomi	33
4.1.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	37
4.1.3. PDRB Per Kapita	39

4.2.	<i>Analisis Shift Share</i>	41
4.2.1.	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Nasional terhadap Perekonomian Pulau Sumatera.....	43
4.2.2.	Dampak Bauran Industri Nasional terhadap Perekonomian di Pulau Sumatera.....	46
4.2.3.	Dampak Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi	48
4.3.	<i>Analisis Location Quotient</i>	50
V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1.	Kesimpulan.....	53
5.2.	Saran.....	53
	DAFTAR PUSTAKA.....	55
	LAMPIRAN.....	56

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1. Posisi Relatif Suatu Sektor berdasarkan Pendekatan PS dan DS	26
3.2. Kemungkinan pada Dampak Alokasi.....	28
4.1. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB di Pulau Sumatera Tahun 2000-2007	34
4.2. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB di Pulau Sumatera Tahun 2000-2007	38
4.3. PDRB Per Kapita dan Laju PDRB Per Kapita Pulau Sumatera Tahun 2000-2007	40
4.4. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera Tahun 2000 dan 2007	42
4.5. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Nasional terhadap Peningkatan PDRB Pulau Sumatera Tahun 2000 dan 2007.....	44
4.6. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Nasional terhadap Peningkatan PDRB Pulau Sumatera Tahun 2000 dan 2007	47
4.7. Identifikasi Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi Perekonomian Sumatera periode 2000 dan 2007	49
4.8. Nilai Location Quotient Pulau Sumatera dirinci per sektor ekonomi Tahun 2000-2007	51

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1	PDRB Pulau Sumatera, Indonesia dan Provinsi Se-Sumatera Tahun 2000 Atas Dasar Harga Konstan 2000	56
2	PDRB Pulau Sumatera, Indonesia dan Provinsi Se-Sumatera Tahun 2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000	57
3	PDRB Pulau Sumatera, Indonesia dan Provinsi Se-Sumatera Tahun 2007 Atas Dasar Harga Berlaku	58

**ANALISIS IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DAN
STRUKTUR EKONOMI PULAU SUMATERA**

**OLEH
DEWI SAVITRI
H14084017**

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dalam Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (2007) merupakan bagian dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai usaha meratakan dan menyebarluaskan pembangunan untuk menyasikan, menyeimbangkan, serta memadukan seluruh kegiatan. Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor.

Pencapaian keberhasilan pembangunan daerah melalui pembangunan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah serta diperlukan perencanaan pembangunan yang terkoordinasi antar sektor, perencanaan pembangunan disini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keterbatasan sumber daya di suatu daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya lainnya merupakan masalah umum yang dihadapi oleh sebagian besar daerah untuk dapat menggerakkan seluruh perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama untuk memacu laju pembangunan disuatu daerah.

Menurut Sjafrizal (2008), sejak dilaksanakannya otonomi daerah sejak tanggal 1 Januari 2001 sesuai dengan Undang-undang No. 22 tentang

Pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintahan dan pembangunan daerah diseluruh nusantara telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sehingga Pemerintah Daerah diberi wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Namun pada prakteknya, otonomi daerah memunculkan beberapa permasalahan yang disebabkan perencanaan pembangunan di masing-masing daerah yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi. Sehingga dibutuhkan suatu kerangka keterpaduan pembangunan dengan penekanan muatan yang berorientasi pada wilayah yang lebih luas, keterpaduan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku pembangunan, keterpaduan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan, menggunakan prinsip sinergi pembangunan dan kemanfaatan bersama.

Secara geografis, Indonesia terdiri dari enam kepulauan besar (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) serta sekitar 17.508 pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhannya mencapai 1.919.443 km² yang terbentang dari barat ke timur sepanjang lebih dari 5.000 km melintasi tiga zona waktu. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar kedua di dunia. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang telah mengamanatkan dalam delapan misi pembangunan Indonesia kedepan untuk

mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam Bab III Lampiran UU No 17 Tahun 2007 tersebut dijelaskan bahwa salah satu misi pembangunan Indonesia dalam 25 tahun kedepan adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan cara menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari wilayah nusantara, Pulau Sumatera merupakan salah satu gugus pulau besar di Indonesia yang berlokasi diapit oleh jalur lalu lintas transportasi laut dan udara regional dan global, selat malaka dan laut cina selatan. Selat Malaka dilalui sekitar 5.000 *ship and boats* per hari yang menjadikannya tersibuk di wilayah Asia Pasifik dan hanya bisa ditandingi Laut Utara di Eropa Barat. *Air traffic* di atas wilayah pantai timur Sumatera-Laut Cina Selatan juga merupakan salah satu yang tersibuk di dunia yang membawa bukan saja penumpang, tetapi juga kargo udara. Laju pertumbuhan *air cargo* di wilayah ini merupakan yang tertinggi di dunia. Sumatera berjarak sangat dekat dengan pelabuhan-pelabuhan samudera Singapura, Tanjung Pelepas di Johor Baru, dan Port Kalng. Juga dengan Bandar Udara Internasional Changi/Singapura, Bangkok, serta Kuala Lumpur. Kesemua lokasi ini merupakan simpul utama dari lalu lintas

laut dan udara di Asia-Pasifik, ASEAN, dan dunia. Fakta seperti ini boleh dikatakan: tak akan tertandingi untuk waktu puluhan tahun, terutama pada wilayah ASEAN sebagai sebuah fakta geoekonomi bahkan geopolitik yang penting. Fakta geografis ini tidak dijumpai dalam hal Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi. Pada kasus Kalimantan dan Papua, sebagian dari wilayah kedua pulau ini terletak di negara lain. (Dorodjatun, 2003).

Perencanaan pembangunan yang mendukung wilayah kepulauan disampaikan di dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan bahwa untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disusun rencana rinci tata ruang yang meliputi rencana tata ruang pulau/kepulauan yang disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua.

Perencanaan pembangunan berdasarkan pulau/kepulauan tersebut memungkinkan koordinasi dan kerjasama pembangunan secara lintas wilayah. Adapun tujuan perencanaan pembangunan ekonomi wilayah Pulau Sumatera yang disusun dalam rancangan peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang Pulau Sumatera antara lain: terarahnya pengembangan Pulau Sumatera secara lebih terpadu dan sinergis sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; terlaksananya pembangunan lintas wilayah dan lintas sektor, dengan mensinergikan kepentingan lintas wilayah (*cross-jurisdiction*) dan lintas sektor (*multi-stakeholder*) dalam pemanfaatan ruang yang berorientasi pada upaya

mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah melalui efektivitas pemanfaatan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian diatas, maka identifikasi dan analisis sektor ekonomi yang menjadi unggulan dalam perencanaan pembangunan dalam wilayah Pulau Sumatera dengan melakukan perbandingan terhadap kondisi perekonomian nasional sangat penting dikaji secara lebih terinci, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi unggulan di Pulau Sumatera dapat lebih dikembangkan. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang layak dikembangkan, maka penyusunan perencanaan pembangunan yang berwawasan kepulauan, terutama di Pulau Sumatera dapat lebih terarah sehingga merangsang terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 yang mengamanatkan pembangunan berbasis kepulauan memberikan wawasan baru untuk operasionalisasi tata ruang wilayah nasional dalam wadah pulau/kepulauan, salah satunya adalah pengembangan Pulau Sumatera dalam satu kesatuan gugus pulau sumatera. Pembangunan dalam kerangka otonomi daerah menyebabkan biaya pembangunan ditanggung oleh setiap daerah dimana tidak semua daerah mempunyai sumber daya yang berlimpah, sehingga ada beberapa daerah yang mempunyai dana terbatas untuk membangun daerahnya masing-masing.

Pada penulisan ini akan dilihat penerapan peraturan pemerintah tersebut di Pulau Sumatera dengan memperhatikan kondisi perekonomian wilayah dalam satu kesatuan gugus Pulau Sumatera dan sektor-sektor yang menjadi unggulan Pulau Sumatera dibandingkan dengan Nasional. Adapun permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi dan daya saing sektor-sektor ekonomi di Pulau Sumatera?
2. Sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Pulau Sumatera dalam memprioritaskan pembangunan wilayah supaya dapat bersaing di perekonomian nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pertumbuhan sektor ekonomi dan daya saing sektor-sektor ekonomi di Pulau Sumatera.
2. Menentukan sektor unggulan di Pulau Sumatera dalam memprioritaskan pembangunan wilayah supaya dapat bersaing di perekonomian nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi Pulau Sumatera secara lebih terpadu dan sinergis.
2. Hasil penelitian ini juga sebagai referensi bagi peneliti dalam kaitannya dengan ekonomi wilayah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas Pulau Sumatera yang dibandingkan dengan kondisi perekonomian Indonesia. Pulau Sumatera merupakan kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang meliputi wilayah darat, laut dan udara yang menjadi bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Undang-Undang pembentukannya.

Penelitian ini hanya difokuskan pada pendekatan secara sektoral, yaitu seluruh kegiatan ekonomi didalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu persatu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Shift Share* untuk melihat pergeseran struktural dan daya saing sektor. Selain itu untuk menentukan sektor unggulan di wilayah ini digunakan alat analisis *Location Quotient*.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Definisi Pembangunan

Pembangunan menurut Todaro (2006) merupakan kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin – melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional – demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Apa pun komponen spesifik atas “kehidupan yang serba lebih baik” itu, proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan

hanya terhadap orang atau negara-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.2. Teori Pembangunan Daerah

Berdasarkan Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (2007) dijelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi. *Pertama*, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional

dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. *Kedua*, dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. *Ketiga*, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahan. Tujuan pembangunan daerah hanya dapat dicapai apabila pemerintah daerah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab.

Dengan pemahaman pembangunan daerah sebagai penjabaran dari pembangunan nasional, kinerja pembangunan nasional merupakan agregat dari kinerja pembangunan seluruh daerah. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian semua provinsi, dan pencapaian tujuan di tingkat provinsi merupakan agregasi pencapaian tujuan di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian tanggungjawab untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran dalam pembangunan nasional menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas.

2.3. Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan/kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah (Sambodo dalam Ghuftron, 2008).

Menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria daerah lebih ditekankan pada komoditas unggulan yang bisa menjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah, diantaranya:

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
3. Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan

baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).

5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disintensif, dan lain-lain.
10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumber daya dan lingkungan.

2.4. Teori Basis Ekonomi

Berdasarkan teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas

perkonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perkonomian wilayah tersebut.

Pengertian basis ekonomi di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis, maksudnya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi; perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah; perkembangan teknologi; dan adanya perkembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah adanya perubahan permintaan dari luar daerah, dan kehabisan cadangan sumber daya.

2.5. Konsep Analisis *shift share*

Pada prinsipnya analisis *shift share* lebih mendalami perbandingan antara perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) dalam suatu kewilayahan tertentu, dengan laju pertumbuhan berbagai sektor yang wilayah lingkungannya lebih luas (lingkup nasional). Metode *Shift Share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan

perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya.

Model analisis ini dapat disebut juga sebagai *industrial mix analysis*, karena komposisi industri yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan wilayah tersebut. Artinya, apakah industri yang berlokasi di wilayah tersebut termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional memang berkembang pesat dan bahwa industri tersebut cocok berlokasi di wilayah itu atau tidak. Analisis *Shift Share* dapat menggunakan variabel lapangan kerja atau nilai tambah. Akan tetapi, yang terbanyak digunakan adalah variabel lapangan kerja karena datanya lebih mudah diperoleh. Apabila menggunakan nilai tambah maka sebaiknya menggunakan data harga konstan.

Keunggulan analisis *Shift Share* diantaranya adalah memberikan gambaran mengenai perubahan struktur ekonomi yang terjadi; walau analisis *shift share* tergolong sederhana; memungkinkan seorang pemula mempelajari struktur perekonomian dengan cepat; dan memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur dengan cukup akurat. Sedangkan kelemahannya, analisis *Shift Share* ini hanya dapat digunakan untuk analisis *ex-post*; masalah *benchmark* yang berkenaan dengan *homothetic change*, apakah t atau $(t+1)$ tidak dapat dijelaskan dengan baik; ada data periode waktu tertentu di tengah tahun pengamatan yang tidak terungkap; analisis ini sangat berbahaya sebagai alat peramalan, mengingat bahwa *regional shift* tidak konstan dari suatu periode ke periode

lainnya; tidak dapat dipakai untuk melihat keterkaitan antarsektor selain itu tidak ada keterkaitan antardaerah. (Lembaga Administrasi Negara, 2007)

2.6. Konsep Analisis *Location Quotient*

Location quotient disingkat LQ adalah suatu metode untuk mengukur spesialisasi relatif dari suatu wilayah/daerah dalam industri-industri tertentu. Metode LQ dapat digunakan untuk mengetahui kapasitas ekspor yang dimiliki oleh daerah. Artinya dengan menggunakan metode ini, perencana dapat mengetahui spesialisasi yang dimiliki oleh daerah dibandingkan dengan daerah yang tingkatannya lebih tinggi atau sektor lain yang memiliki kategori yang sama. (Tarigan, 2007).

Menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor baru atau sedang tumbuh apalagi selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Adalah lebih tepat untuk melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek untuk diekspor atau tidak, dengan catatan terhadap produk tersebut tidak diberikan subsidi daerah-daerah lainnya.

Analisis LQ sesuai dengan rumusannya memang sangat sederhana dan apabila digunakan dalam bentuk *one shot analysis*, manfaatnya juga tidak begitu besar, yaitu hanya melihat apakah LQ berada di atas 1 atau tidak. Akan tetapi analisis LQ bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam

bentuk analisis runtun waktu (time series/ trend). Analisis dilakukan dalam beberapa periode/kurung waktu tertentu.

Pada keadaan ini, perkembangan LQ diamati untuk suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini menarik untuk diamati lebih lanjut, misalnya apabila naik maka dikaji faktor-faktor yang membuat daerah itu tumbuh lebih cepat lebih cepat dari rata-rata nasional. Kalau terjadi penurunan, maka dikaji faktor-faktor apa yang menyebabkan pertumbuhan lebih lambat dari rata-rata nasional.

Keadaan yang diuraikan di atas dapat membantu mengetahui kekuatan/kelemahan suatu daerah dibandingkan secara relatif dengan wilayah lain yang lebih luas. Potensi yang positif digunakan dalam strategi pengembangan daerah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan potensi daerah lemah, perlu dipikirkan apakah segera ditanggulangi atau dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan, sehingga bisa dianggap tidak prioritas.

Beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak langsung; metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan pada data historis untuk mengetahui *trend*. Sedangkan beberapa kelemahan metode LQ adalah metode ini berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah identik dengan pola permintaan bangsa dan bahwa produktivitas tiap pekerja di setiap sektor regional sama dengan produktivitas tiap pekerja dalam

industri-industri nasional. Selain itu metode ini berasumsi bahwa tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi. (Lembaga Administrasi Negara, 2007)

2.7. Penelitian Terdahulu

Ghufro (2008) melakukan analisis pembangunan wilayah berbasis sektor unggulan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis *Location Quotient* menunjukkan ada tiga sektor unggulan Kabupaten Lamongan yang menjadi basis ekonomi daerah, yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Analisis *shift share* menunjukkan sektor pertanian memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik, begitu juga pada sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Rini (2006) menganalisis pertumbuhan sektor-sektor perkonomian 30 provinsi di Indonesia tahun 1998 dan 2003 jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan analisis *shift share* yang memperlihatkan kontribusi pertumbuhan terbesar ada pada sektor listrik, gas dan air minum, sedangkan kontribusi pertumbuhan terkecil adalah sektor bangunan. Nilai pergeseran bersih menunjukkan bahwa terdapat 16 provinsi yang termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang progresif dan 14 provinsi lainnya termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang lamban. Provinsi yang mempunyai daya saing yang

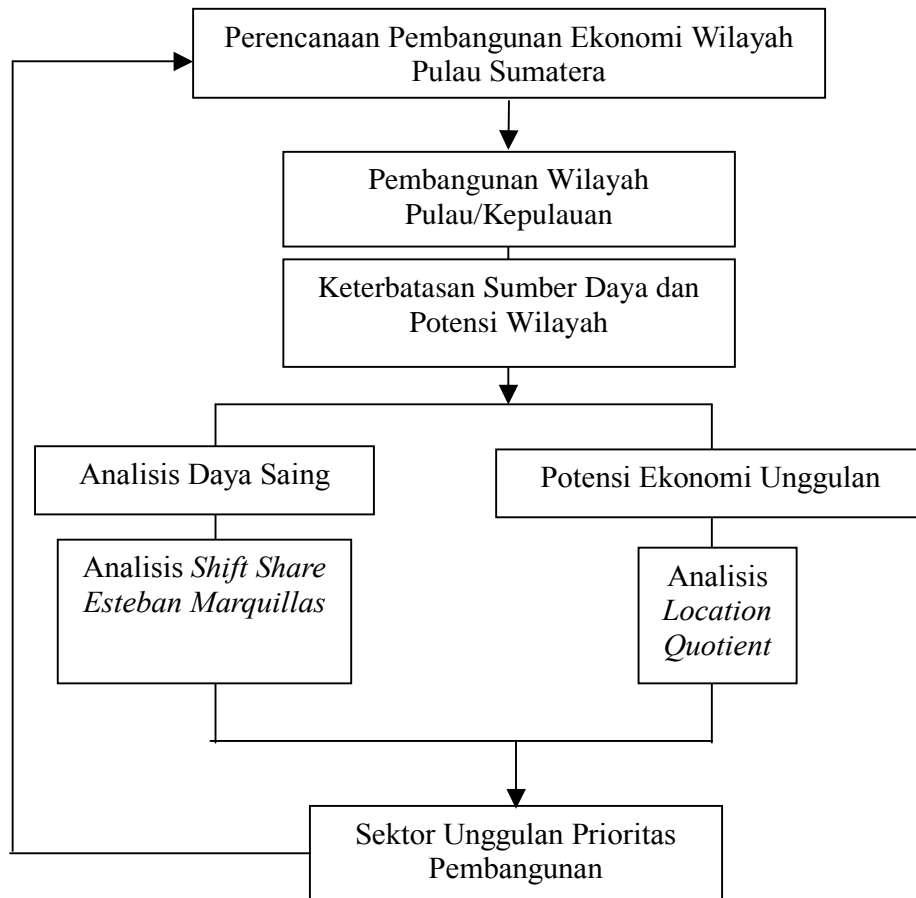
paling baik dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi paling cepat adalah Provinsi Jawa Barat, sedangkan Provinsi Maluku merupakan provinsi yang mempunyai pertumbuhan paling lamban dengan daya saing sektor yang kurang baik.

2.6. Kerangka Pemikiran

Pada perencanaan pembangunan ekonomi wilayah pulau sumatera untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi baik lokal maupun regional. Berdasarkan konsep pulau/kepulauan dalam satu kesatuan kegiatan perekonomian, pada masa otonomi daerah diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang ada dan melihat keterbatasan sumber daya yang berbeda-beda di masing-masing daerah.

Pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat dilihat dari perkembangan indikator ekonomi yang ada, salah satunya menggunakan PDRB. Pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor dengan melihat sektor-sektor yang menjadi unggulan di wilayah Pulau Sumatera. Adapun sektor-sektor ekonomi di Pulau Sumatera terdiri dari sembilan sektor antara lain : sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; sektor bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.

Dengan melihat segala keterbatasan sumber daya masing-masing daerah, maka dalam perencanaan pembangunan tersebut perlu ditentukan sektor-sektor dan subsektor-subsektor ekonomi yang menjadi unggulan dan prioritas pembangunan di Pulau Sumatera agar perencanaan pembangunan tersebut dapat lebih terarah.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Dari penelitian ini akan diperoleh sektor-sektor apa sajakah yang menjadi sektor unggulan ekonomi di Pulau Sumatera. Struktur ekonomi dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap

PDRB. Penentuan sektor potensial dilihat dari keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif sektor tersebut terhadap sektor yang sama pada tingkat nasional. Untuk melihat spesialisasi dan keunggulan kompetitif digunakan Analisis *Shift-Share*. Kemudian untuk melihat keunggulan komparatif suatu sektor digunakan Analisis *Location Quotient* (LQ).

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang tercakup dalam penelitian ini adalah data PDRB provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun 2000 – 2007 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan, demikian juga data PDB Indonesia tahun 2000 – 2007 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan, disertai dengan data-data sekunder lain yang relevan dengan tujuan penulisan skripsi ini.

3.2. Analisis *Shift-Share*

Analisis *shift-share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode itu dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional.

Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

Untuk mengkaji kinerja berbagai sektor ekonomi yang berkembang di suatu daerah dan membandingkannya dengan perekonomian regional maupun nasional dapat digunakan teknik analisis *Shift-Share*. Dengan teknik ini, selain dapat mengamati penyimpangan-penyimpangan dari berbagai perbandingan kinerja perekonomian antar wilayah, keunggulan kompetitif suatu wilayah juga dapat diketahui melalui teknik analisis *Shift-Share* ini (Thoha dan Soekarni, 2000:52).

Metode analisis *shift share* diawali dengan mengukur perubahan nilai tambah bruto atau PDRB suatu sektor - i di suatu region - j (D_{ij}) dengan formulasi (Soepono, 1993) :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad \dots\dots\dots (1)$$

di mana:

$$N_{ij} = E_{ij} \cdot r_n \quad \dots\dots\dots (2)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{in} - r_n) \quad \dots\dots\dots (3)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \quad \dots\dots\dots (4)$$

Dari persamaan (2) sampai (4), r_{ij} mewakili pertumbuhan sektor/subsektor i di wilayah j, sedangkan r_n dan r_{in} masing-masing laju pertumbuhan agregat nasional/provinsi dan pertumbuhan sektor/subsektor i secara nasional/provinsi, yang masing-masing dapat didefinisikan sebagai berikut:

$$r_{ij} = (E_{ij,t} - E_{ij})/E_{ij} \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$r_{in} = (E_{in,t} - E_{in})/E_{in} \quad \dots\dots\dots (6)$$

$$r_n = (E_{n,t} - E_n)/E_n \quad \dots\dots\dots (7)$$

Keterangan;

D_{ij} : Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah Pulau Sumatera

N_{ij} : Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah Pulau Sumatera yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi secara nasional

M_{ij} : Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah Pulau Sumatera yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i secara nasional

C_{ij} : Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah Pulau Sumatera yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah Pulau Sumatera

E_{ij} : PDRB sektor/subsektor i di wilayah Pulau Sumatera tahun awal analisis

E_{in} : PDB sektor/subsektor i di Indonesia tahun awal analisis

E_n : PDRB total di Indonesia tahun awal analisis

$E_{ij,t}$: PDRB sektor/subsektor i di wilayah Pulau Sumatera tahun akhir analisis

$E_{in,t}$: PDRB sektor/subsektor i di Indonesia tahun akhir analisis

$E_{n,t}$: PDRB total di Indonesia tahun akhir analisis

Menurut Budiharsono dalam Ghufron (2008) analisis *Shift Share* ini menganalisis perubahan berbagai indikator kegiatan ekonomi, seperti produksi dan kesempatan kerja, pada dua titik waktu disuatu wilayah. Analisis *Shift Share* memiliki kemampuan untuk menunjukkan: perkembangan sektor perekonomian

disuatu wilayah terhadap perkembangan ekonomi wilayah yang lebih luas; perkembangan sektor-sektor perekonomian jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya; perkembangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat membandingkan besarnya aktivitas suatu sektor pada wilayah tertentu dan pertumbuhan antar wilayah; dan perbandingan laju sektor-sektor perekonomian disuatu wilayah dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektor-sektornya

Persamaan (2) sampai (4) juga menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah suatu sektor di suatu wilayah (D_{ij}) dapat diuraikan menjadi 3 faktor berpengaruh, yaitu (Sjafrizal, 2002) :

1. **Regional Share (N_{ij})** : adalah merupakan komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh faktor luar yaitu: peningkatan kegiatan ekonomi daerah akibat kebijaksanaan nasional yang berlaku pada seluruh daerah.
2. **Proportional Shift (M_{ij}) atau PS**: adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah yang disebabkan oleh struktur ekonomi daerah yang baik, yaitu berspesialisasi pada sektor yang pertumbuhannya cepat seperti sektor industri.
3. **Differential Shift (C_{ij}) atau DS**: adalah komponen pertumbuhan ekonomi daerah karena kondisi spesifik daerah yang bersifat kompetitif. Unsur pertumbuhan ini merupakan keuntungan kompetitif daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekspor daerah.

Melalui ketiga komponen tersebut dapat diketahui komponen atau unsur pertumbuhan yang mana yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai masing-masing komponen dapat saja negatif atau positif, tetapi jumlah keseluruhan akan selalu positif, bila pertumbuhan ekonomi juga positif, demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan persamaan (1) sampai (7) di atas, maka untuk suatu wilayah, pertumbuhan nasional atau regional, bauran industri dan keunggulan kompetitif dapat ditentukan bagi suatu sektor i atau dijumlah untuk semua sektor sebagai keseluruhan wilayah. Persamaan *Shift-Share* untuk sektor i di wilayah j adalah:

$$D_{ij} = E_{ij} \cdot r_n + E_{ij} (r_{in} - r_n) + E_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (8)$$

Selanjutnya menurut Oppenheim (1980), Bedad-Alal (1983), Patton (1991), Field dan MacGregor (1993) dalam Yusuf (1999) dalam analisis pertumbuhan ekonomi regional komponen *proportional shift* (PS) dan *differential shift* (DS) lebih penting dibanding komponen *regional share*. Hal ini disebabkan karena DS digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan dari suatu kegiatan di wilayah studi terhadap kegiatan tersebut di wilayah referensi. Dari perubahan tersebut akan dapat dilihat berapa besar penambahan atau pengurangan pendapatan dari kegiatan tersebut. Sedangkan PS untuk melihat perubahan pertumbuhan suatu kegiatan di wilayah referensi terhadap kegiatan total (PDRB) di wilayah referensi. Dari kedua komponen ini jika besaran PS dan DS dinyatakan dalam suatu bidang datar, dengan nilai PS sebagai sumbu horisontal dan nilai DS sebagai sumbu vertikal, akan diperoleh

empat kategori posisi relatif dari seluruh daerah atau sektor ekonomi tersebut.

Keempat kategori tersebut adalah (Freddy, 2001) :

Tabel 3.1. Posisi Relatif Suatu Sektor berdasarkan Pendekatan PS dan DS

<i>Differential shift</i> (DS)	<i>Propotional shift</i> (PS)	
	Negatif (-)	Positif (+)
Positif (+)	Cenderung Berpotensi (<i>Highly Potential</i>)	Pertumbuhan Pesat (<i>Fast Growing</i>)
Negatif (-)	Terbelakang (<i>Depressed</i>)	Berkembang (<i>Developing</i>)

Sumber : Freddy, 2001

- Kategori I (PS positif dan DS positif) adalah wilayah/sektor dengan pertumbuhan sangat pesat (*rapid growth region/industry or fast growing*).
- Kategori II (PS negatif dan DS positif) adalah wilayah/sektor dengan kecepatan pertumbuhan terhambat tapi berkembang (*depressed region/industry yang berkembang/ developing*).
- Kategori III (PS positif dan DS negatif) adalah wilayah/sektor dengan kecepatan pertumbuhan terhambat namun cenderung berpotensi (*depressed region/industry yang berpotensi*).
- Kategori IV (PS negatif dan DS negatif) adalah wilayah/sektor *depressed region/industry* dengan daya saing lemah dan juga peranan terhadap wilayah rendah.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat spesialisasi perekonomian di suatu daerah juga dapat dilakukan dengan modifikasi analisis *shift-share* ini. Estaban Marguillas pada tahun 1972 telah melakukan modifikasi terhadap teknik analisis *Shift-share* untuk memecahkan masalah pengaruh efek alokasi dan spesialisasi (Soepono, 1993). Dengan mengacu kepada persamaan (1) sampai (8), maka modifikasi persamaan *Shift-Share* menurut *Estaban Marguillas* mengandung unsur baru yang diberi notasi E^*_{ij} didefinisikan sebagai suatu variabel wilayah (E_{ij}), bila struktur wilayah sama dengan struktur nasional atau $E_{ij} = E^*_{ij}$ maka E^*_{ij} dirumuskan menjadi :

$$E^*_{ij} = E_j (E_{in}/E_n) \dots\dots\dots (9)$$

Apabila E_{ij} diganti dengan E^*_{ij} maka persamaan $C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$ dapat pula diganti menjadi :

$$C^*_{ij} = E^*_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (10)$$

C_{ij} adalah untuk mengukur keunggulan atau ketidakunggulan kompetitif di sektor i pada perekonomian di suatu wilayah menurut analisis *Shift-share* klasik. Pengaruh efek alokasi (*allocation effect*) belum dijelaskan dari suatu variabel wilayah untuk sektor i di wilayah j (A_{ij}), untuk mengetahui efek alokasi tersebut didekati dengan menggunakan rumus (Soepono, 1993) :

$$A_{ij} = (E_{ij} - E^*_{ij}) (r_{ij} - r_{in}) \dots\dots\dots (11)$$

dimana:

$(E_{ij} - E^*_{ij})$: menggambarkan tingkat spesialisasi sektor i di wilayah j ,
jika $r_{ij} > r_{in}$

$(r_{ij} - r_{in})$: menggambarkan tingkat keunggulan kompetitif sektor i di wilayah j

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa A_{ij} sebagai pengaruh alokasi dapat dilihat dalam dua bagian yaitu tingkat spesialisasi sektor i di wilayah j ($E_{ij} - E^*_{ij}$) yang dikalikan dengan keunggulan kompetitif ($r_{ij} - r_{in}$). Persamaan tersebut dapat bermakna bahwa bila suatu wilayah mempunyai suatu spesialisasi di sektor-sektor tertentu, maka sektor-sektor tersebut pasti akan menikmati pula keunggulan kompetitif yang lebih baik.

Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari dampak alokasi akan dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Kemungkinan pada dampak alokasi

No.	$r_{ij} - r_{in}$	$E_{ij} - E^*_{ij}$	Keunggulan Kompetitif	Spesialisasi
1	> 0	> 0	√	√
2	> 0	< 0	√	x
3	< 0	> 0	x	√
4	< 0	< 0	x	x

3.4 Location Quotient (LQ)

Location quotient merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk melengkapi analisis *shift-share*. Secara umum, analisis ini digunakan untuk menentukan sektor basis dan non basis, dengan tujuan untuk melihat keunggulan komparatif suatu daerah dalam menentukan sektor unggulannya.

Dalam teknik ini, menurut Tarigan (2007) kegiatan ekonomi suatu

daerah dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. sektor basis adalah sektor ekonomi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Artinya sektor ini dalam aktivitasnya mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun daerah lain dan dapat dijadikan sektor unggulan;
- b. sektor non basis merupakan sektor ekonomi yang hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri, sektor seperti ini dikenal sebagai sektor non unggulan.

Teori ini selanjutnya menyatakan bahwa karena sektor basis menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual keluar daerah yang meningkatkan pendapatan daerah tersebut, maka secara berantai akan meningkatkan investasi yang berarti menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya meningkatkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis. Dengan dasar teori ini maka sektor basis perlu diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Rumusan *Location Quotient* (LQ) menurut Bendavid Val (Tarigan 2007), yang kemudian digunakan dalam penentuan sektor basis dan non basis di Provinsi Sumatera Utara, yang dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$LQ = \frac{X_r / RV_r}{X_n / RV_n} \text{ atau } LQ = \frac{X_r / X_n}{RV_r / RV_n} \dots\dots\dots (13)$$

Dimana:

LQ = Koefisien Location Quotient (LQ) Sumatera

X_r = PDRB sektor i di Sumatera

RV_r = Total PDRB Sumatera

X_n = PDB sektor i Indonesia

RV_n = Total PDB Indonesia.

Selanjutnya Bendavid Val memberikan pengukuran terhadap derajat spesialisasi dengan kriteria sebagai berikut:

1. $LQ > 1$

Jika LQ lebih besar dari 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada Provinsi Sumatera Utara lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat nasional.

2. $LQ < 1$

Jika LQ lebih kecil dari 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada Provinsi Sumatera Utara lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat nasional.

3. $LQ = 1$

Jika LQ sama dengan 1, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada Provinsi Sumatera Utara sama dengan sektor yang sama pada tingkat nasional.

3.5. Definisi Operasional Variabel

Beberapa variabel yang digunakan untuk kepentingan penelitian ini memiliki konsep dan definisi sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan merupakan nilai produksi barang dan jasa akhir dalam suatu waktu kurun waktu tertentu orang-orang dan

perusahaan. Dinamakan bruto karena memasukkan komponen penyusutan. Disebut domestik karena menyangkut batas wilayah. Disebut Konstan karena harga yang digunakan mengacu pada tahun tertentu (tahun dasar = 2000) dan dinamakan berlaku karena menggunakan harga tahun berjalan (tahun sesuai dengan referensi waktu yang diinginkan). PDRB juga sering disebut dengan NTB (Nilai Tambah Bruto). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku digunakan untuk menghitung kontribusi sektor ekonomi setiap tahunnya yang dibandingkan total PDRB masing-masing tahun analisis.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Produk Domestik regional Bruto (PDRB) per kapita menggambarkan besarnya nilai tambah domestik regional bruto per penduduk pada suatu wilayah, dalam suatu waktu tertentu, pada analisis ini digunakan pendekatan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB per kapita ini diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga konstan di suatu wilayah pada jangka waktu satu tahun, dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang berada dalam wilayah/region tersebut.
3. Sektor Ekonomi menyatakan lapangan usaha pembentuk PDRB sektoral di suatu wilayah. Berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990 lapangan usaha/sektor ekonomi terbagi menjadi sembilan sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan,

sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya dan sektor jasa-jasa

4. Sektor dan subsektor ekonomi potensial merupakan sektor dan subsektor ekonomi yang memiliki satu atau gabungan kriteria seperti keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, spesialisasi jika dibandingkan dengan sektor dan subsektor ekonomi yang sama pada wilayah lainnya.
5. Keunggulan Kompetitif berarti kemampuan daya saing kegiatan ekonomi yang lebih besar pada suatu daerah terhadap kegiatan ekonomi yang sama di daerah lainnya. Keunggulan kompetitif juga merupakan cermin dari keunggulan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya yang dijadikan "*benchmark*"
6. Keunggulan komparatif mengacu pada kegiatan ekonomi suatu daerah yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi perekonomian daerah tersebut. Perbandingan tersebut merupakan perbandingan kontribusi nilai tambah bruto suatu sektor/subsektor ekonomi suatu daerah yang lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya.
7. Spesialisasi mengacu kepada sektor ekonomi di suatu wilayah, dimana suatu wilayah dikatakan memiliki spesialisasi jika wilayah tersebut mengembangkan suatu sektor ekonomi sehingga pertumbuhan maupun andil sektor tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah lainnya, spesialisasi juga tercipta akibat potensi sumber daya alam yang besar maupun peran permintaan pasar yang besar terhadap output-output lokal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Perekonomian

4.1.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian di Pulau Sumatera dapat dilihat dari besarnya peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku. Secara umum, struktur perekonomian Pulau Sumatera dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 didominasi oleh empat sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Keempat sektor tersebut mewakili sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier pada kegiatan sektor-sektor ekonomi di Pulau Sumatera.

Pergeseran kontribusi terjadi selama tahun-tahun tersebut secara bertahap, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar pada dua tahun pertama, pada tahun 2000, sektor pertambangan dan penggalian mampu menyumbang 26,92 persen PDRB, namun kemudian pada tahun-tahun berikutnya sektor ini mengalami total penurunan yang cukup besar, mulai dari 23,50 persen, turun menjadi 21,34 persen, dan turun lagi menjadi 19,86 persen dan pada tahun 2004 turun menjadi 18,89 persen, meski pada tahun 2005 dan 2006 sempat membaik, namun kembali turun pada tahun 2007 pada angka 19,34 persen. Sektor ini didominasi oleh subsektor minyak dan gas bumi sehingga berkurangnya hasil pertambangan minyak dan gas bumi

di wilayah Pulau Sumatera terutama di provinsi-provinsi penghasil minyak tertinggi di Pulau Sumatera seperti Riau, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau menyebabkan menurunnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalan.

Tabel 4.1. Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB di Pulau Sumatera (Juta Rupiah)

Sektor/Subsektor	Tahun						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	22,44	23,06	23,50	23,58	23,87	23,60	22,60
a. Tanaman Bahan Makanan	7,82	7,90	7,78	7,43	7,29	7,08	6,59
b. Tanaman Perkebunan	6,91	6,87	7,29	7,75	8,31	8,38	8,30
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,33	2,46	2,54	2,49	2,39	2,13	1,83
d. Kehutanan	2,42	2,56	2,65	2,74	2,74	2,72	2,73
e. Perikanan	2,96	3,27	3,24	3,16	3,14	3,28	3,15
2. Pertambangan & Penggalan	26,92	23,50	21,34	19,86	18,89	19,51	19,34
a. Minyak dan Gas Bumi	25,24	21,79	19,57	18,11	17,01	17,63	17,42
b. Pertambangan tanpa Migas	0,85	0,84	0,84	0,83	0,92	0,96	0,99
c. Penggalan	0,83	0,87	0,93	0,92	0,96	0,91	0,94
3. Industri Pengolahan	16,66	18,35	18,58	19,19	19,37	18,95	20,13
a. Industri Migas	4,26	4,28	3,68	3,53	3,54	3,58	2,78
b. Industri Tanpa Migas	12,40	14,07	14,90	15,66	15,83	15,37	17,35
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,44	0,51	0,65	0,75	0,75	0,71	0,62
a. Listrik	0,33	0,37	0,48	0,57	0,57	0,53	0,47
b. Gas	0,03	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,05
c. Air Bersih	0,09	0,09	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10
5. Bangunan	4,51	4,54	4,76	4,74	4,87	4,65	5,13
6. Perdag, Hotel & Restoran	13,05	13,51	13,60	13,53	13,63	14,34	13,75
a. Perdagangan Besar & Eceran	12,04	12,46	12,45	12,36	12,44	13,09	12,52
b. Hotel	0,19	0,19	0,22	0,21	0,23	0,31	0,30
c. Restoran	0,81	0,86	0,93	0,95	0,95	0,94	0,92
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,75	5,05	5,54	5,73	5,71	5,97	6,31
a. Pengangkutan	4,12	4,37	4,70	4,85	4,71	4,92	5,21
b. Komunikasi	0,64	0,68	0,84	0,88	0,99	1,05	1,10
8. Keu, Sewa & Jasa Persh	3,41	3,46	3,79	4,05	4,23	4,11	4,03
a. Bank	0,91	0,87	0,96	1,15	1,28	1,25	1,30
b. Lembaga Keuangan bukan Bank	0,24	0,26	0,29	0,29	0,30	0,30	0,28
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
d. Sewa Bangunan	1,97	2,04	2,24	2,29	2,33	2,25	2,17
e. Jasa Perusahaan	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,30	0,28
9. Jasa-Jasa	7,83	8,01	8,25	8,57	8,69	8,18	8,08
a. Pemerintahan Umum	5,65	5,78	5,94	6,23	6,36	5,88	5,88
b. Swasta	2,18	2,24	2,31	2,34	2,33	2,29	2,19
Pertumbuhan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, kontribusi tertinggi yang pada awalnya diberikan oleh sektor pertambangan mulai digantikan oleh sektor pertanian yang masih mewakili sektor primer, sejak awal sektor pertanian secara umum cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya meski persentasenya tidak terlalu besar. Kenaikan sektor ini disebabkan oleh subsektor tanaman perkebunan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Lahan yang sangat luas dan sangat cocok bagi tanaman perkebunan memberikan kesempatan bagi petani berinvestasi di subsektor ini, menyebabkan kontribusi sektor ini semakin membaik dan memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi struktur perekonomian di Pulau Sumatera.

Pergeseran sektor pertambangan dan penggalian secara perlahan berimplikasi pada peningkatan kontribusi sektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2007, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar hingga mencapai 20,13 persen sehingga menjadikannya sektor kedua yang paling berperan dalam pembentukan struktur perekonomian di Pulau Sumatera, meski sektor industri pengolahan tidak terlepas dari sektor pertambangan dan penggalian, terutama pada industri migas yang sangat berpengaruh dengan ketersediaan bahan mentah yang diperoleh dari sektor tersebut, namun kenaikan pada subsektor industri tanpa migas mampu memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga mampu mengimbangi subsektor industri migas yang semakin menurun. Sektor industri pengolahan merupakan perwakilan sektor sekunder ternyata mampu menggeser kedudukan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini menandakan pergeseran sektor ekonomi yang

berdampak pada pembangunan cenderung membaik, yaitu terjadinya pergeseran dari sektor primer menjadi sektor sekunder.

Sektor ekonomi lainnya yang cukup berperan besar dalam perekonomian Pulau Sumatera adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sejak tahun 2000 sampai tahun 2007, kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB Pulau Sumatera mengalami kenaikan dan penurunan disebabkan. Pada tahun 2000 sektor ini memiliki kontribusi sebesar 13,05 persen, kemudian di tahun 2001 dan tahun 2002 mengalami peningkatan menjadi 13,51 persen dan 13,60 persen, hal ini disebabkan karena kenaikan pada subsektor perdagangan besar dan eceran yang cukup signifikan, namun pada tahun 2003 mengalami penurunan kontribusi sehingga mencapai angka 13,53 lalu pada tahun 2004 dan 2006 kembali mengalami peningkatan menjadi 13,63 persen dan 14,34 persen, kemudian kembali turun pada tahun 2006 dan 2007 hingga menjadi 14,22 persen dan 13,75 persen. Sementara itu, sektor-sektor ekonomi lainnya hanya memiliki peran dibawah 10 persen dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Jika ditinjau berdasarkan subsektor maka kondisi perekonomian di Pulau Sumatera tidak menunjukkan perbedaan jika dibandingkan secara sektoral. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekonomi yang dominan pada tingkat subsektor merupakan pemberi kontribusi yang besar juga pada tingkat sektor ekonomi yang dominan. Hal ini dapat terlihat pada masing-masing sektor, pada sektor pertanian, subsektor dominan adalah subsektor tanaman perkebunan, pada sektor pertambangan dan penggalian, didominasi oleh

subsektor minyak dan gas bumi, sektor industri pengolahan memperlihatkan dominasi pada subsektor industri tanpa migas, begitu juga sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terbentuk oleh nilai tambah dominan pada sektor perdagangan besar dan eceran.

4.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dari tahun 2001 sampai tahun 2007 cukup baik meski sempat mengalami penurunan pada tahun 2003 dan 2004, penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 tersebut sangat dipengaruhi oleh penurunan hasil produksi sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan pada tahun 2004, penurunan laju pertumbuhan disebabkan oleh sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami penurunan laju pertumbuhan. Penurunan tersebut juga tergambar pada penurunan laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing subsektornya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 hingga tahun 2007 menunjukkan kinerja yang membaik, hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,63 persen pada tahun 2005, yang kemudian naik menjadi 5,19 persen pada tahun 2006, begitu juga pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga mencapai 9,26 persen.

Selanjutnya jika dirinci secara sektoral, sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2001 mengalami pertumbuhan yang negatif, begitu juga pada tahun 2004 hingga tahun 2007, seperti halnya terlihat pada kontribusi

struktur ekonomi yang dari tahun ke tahun yang juga semakin berkurang. Pada tahun 2007, sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah sektor industri pengolahan sebesar 33,18 persen, kemudian diikuti oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 11,44 persen.

Tabel 4.2. Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB di Pulau Sumatera (Persen)

Sektor/Subsektor	Tahun							Rata2
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1. Pertanian	4,29	3,77	4,32	5,38	4,01	4,70	5,11	5,17
a. Tanaman Bahan Makanan	4,07	1,89	3,57	6,03	2,53	1,65	5,23	3,96
b. Tanaman Perkebunan	5,05	5,53	5,03	7,62	6,77	7,97	5,91	7,57
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2,60	3,62	4,97	0,13	0,69	2,82	2,15	2,60
d. Kehutanan	5,24	4,49	5,32	2,27	2,32	2,86	1,82	3,85
e. Perikanan	3,66	4,10	3,21	5,02	4,87	7,03	7,38	5,86
2. Pertambangan & Penggalian	-8,02	7,67	2,06	-5,77	-1,60	1,38	-2,35	-1,03
a. Minyak dan Gas Bumi	-8,68	7,89	1,71	-6,68	-2,19	0,57	-3,21	-1,57
b. Pertambangan tanpa Migas	-0,33	4,55	7,93	4,04	4,56	9,16	5,22	5,79
c. Penggalian	4,24	4,90	5,85	8,48	5,91	11,12	6,94	8,29
3. Industri Pengolahan	0,14	4,50	3,80	1,95	1,19	3,49	33,18	7,78
a. Industri Migas	-7,31	-3,49	0,43	-5,52	-15,40	-8,43	-7,30	-5,58
b. Industri Tanpa Migas	2,70	6,98	4,75	3,95	5,23	5,82	40,04	12,37
4. Listrik, Gas & Air Bersih	10,12	8,21	5,52	5,85	6,74	10,89	4,86	9,31
a. Listrik	10,07	8,69	6,15	6,77	6,71	7,15	7,27	9,47
b. Gas	14,76	7,23	5,65	2,54	17,29	74,97	-14,61	19,09
c. Air Bersih	8,93	6,63	2,97	3,14	3,51	4,12	5,81	5,81
5. Bangunan	0,79	6,87	6,03	7,23	6,50	11,16	10,11	8,52
6. Perdag, Hotel & Restoran	5,82	5,50	4,76	5,09	15,37	7,11	6,68	8,86
a. Perdagangan Besar & Eceran	5,82	5,31	4,69	4,99	14,84	7,06	6,59	8,64
b. Hotel	7,28	9,21	2,65	7,28	58,58	9,17	10,35	20,92
c. Restoran	5,45	7,42	6,19	6,06	12,82	7,14	6,72	9,23
7. Pengangkutan & Komunikasi	6,90	8,58	8,84	10,01	9,81	10,22	9,94	12,13
a. Pengangkutan	5,87	7,91	7,98	8,67	8,38	8,62	7,81	10,02
b. Komunikasi	13,51	12,61	13,81	17,41	17,10	17,71	19,16	25,79
8. Keu, Sewa & Jasa Persh	1,08	6,16	10,99	10,21	6,93	9,54	11,44	10,19
a. Bank	-7,93	6,04	22,11	17,90	8,00	13,34	18,59	14,86
b. Lembaga Keuangan bukan Bank	5,14	11,20	5,94	7,59	6,82	7,49	6,50	8,99
c. Jasa Penunjang Keuangan	1,92	10,00	6,70	14,75	6,24	7,47	13,66	11,16
d. Sewa Bangunan	4,04	5,36	7,07	7,14	6,44	7,98	8,59	8,13
e. Jasa Perusahaan	5,95	7,57	11,26	8,89	6,65	8,59	8,73	10,55
9. Jasa-Jasa	2,84	4,26	6,78	6,97	5,80	6,22	8,14	6,97
a. Pemerintahan Umum	2,38	3,93	6,99	7,23	5,71	5,94	8,18	6,84
b. Swasta	4,02	5,09	6,25	6,32	6,02	6,94	8,04	7,32
Pertumbuhan	0,26	5,62	4,47	2,68	4,63	5,19	9,26	5,23

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Kemudian jika pertumbuhan dirinci per subsektor, maka pada tahun 2007, subsektor industri tanpa migas memiliki pertumbuhan yang tertinggi, yaitu sebesar 40,04 persen. Subsektor komunikasi juga mampu tumbuh sebesar 19,16 persen, selain itu laju pertumbuhan sebesar 18,59 persen diberikan oleh hotel.

Berdasarkan pengamatan diatas, berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2000 secara rata-rata selama periode 2001 sampai dengan 2007, laju pertumbuhan sektor perekonomian Pulau Sumatera sebesar 5,23 persen. Jika dilihat berdasarkan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB, semua sektor tersebut mencatat pertumbuhan yang positif kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki nilai negatif.

Bila diurutkan rata-rata laju pertumbuhan PDRB menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi ke yang terendah, dapat dilihat sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 12,13 persen, hal ini dimungkinkan karena semakin membaiknya infrastruktur di Pulau Sumatera sehingga perdagangan antar pulau semakin meningkat, kemudian diikuti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 10,19 persen, selanjutnya diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 9,31 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,86 persen, sektor bangunan sebesar 8,52 persen, sementara kegiatan sektor ekonomi lainnya seperti sektor industri pengolahan menempati peringkat keenam, diikuti sektor jasa-jasa sebesar 6,97 persen; sektor pertanian sebesar 5,17 persen. Sedangkan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian

lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar minus 1,03 persen.

4.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah pada waktu tertentu. PDRB perkapita didapat dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Walaupun nilai PDRB per kapita tidak mampu mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu wilayah, namun PDRB perkapita tetap merupakan indikator yang cukup penting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut.

**Tabel 4.3. PDRB Per Kapita dan Laju PDRB Per Kapita
Pulau Sumatera Tahun 2000 - 2007**

Tahun	PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp)	Laju PDRB Per Kapita (ADHK) (%)
2000	8.136.986	-
2001	8.956.792	-0,83
2002	9.801.922	4,17
2003	9.750.046	-7,96
2004	10.926.658	1,72
2005	12.828.173	2,04
2006	14.842.313	3,34
2007	16.914.120	2,47

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Besarnya PDRB per kapita Pulau Sumatera meningkat dari tahun ke tahunnya, PDRB per kapita yang semula sebesar 8.136.986 rupiah pada tahun

2000 menjadi sebesar 16.914.120 rupiah pada tahun 2007. Sebagai perbandingan peningkatan secara riil setiap tahunnya dapat dilihat laju pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2001 sampai tahun 2007 berdasarkan harga konstan 2000. Laju PDRB per kapita tahun 2007 bila dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,47 persen, sementara pada tahun 2006 laju pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 3,34 persen.

4.2 Analisis Shift Share

Peningkatan kegiatan ekonomi yang diindikasikan oleh kenaikan PDRB suatu wilayah dapat diperluas (*decompose*) atas 3 faktor pengaruh/komponen (Sjafrizal, 2008). Secara rinci ketiga faktor pengaruh tersebut adalah peningkatan PDRB yang disebabkan oleh faktor luar (kebijakan nasional/provinsi) atau sering disebut dengan efek pertumbuhan ekonomi regional (N_{ij}). Pengaruh kedua adalah pengaruh struktur pertumbuhan sektor dan subsektor, atau disebut dengan *industrial mix-effect* (efek bauran industri- M_{ij}) dan terakhir adalah pengaruh keuntungan kompetitif wilayah studi (C_{ij}). Namun dalam perkembangannya ketiga pengaruh ini bertambah, yaitu pengaruh spesialisasi perekonomian wilayah (A_{ij}). Penambahan pengaruh pertumbuhan ini telah dikembangkan oleh Estaban Marquillas (dalam Soepono, 1993) yang dipresentasikan dalam model analisis shift-share modifikasi lagi menjadi Estaban Marquillas (Analisis SS-EM).

Tabel 4.4. Komponen Pertumbuhan Ekonomi Pulau Sumatera Tahun 2000 dan 2007 (juta rupiah)

Sektor/Subsektor	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Nasional N_{ij}	Dampak Bauran Industri M_{ij}	Differential Shift C_{ij}		Total Peningkatan PDRB D_{ij}
			Keunggulan Kompetitif C_{ij}'	Spesialisasi A_{ij}	
1. Pertanian	27.578.064	-10.722.443	5.311.240	1.975.888	24.142.748
a. Tanaman Bahan Makanan	9.610.024	-5.113.613	2.115.889	-163.611	6.448.689
b. Tanaman Perkebunan	8.486.308	-2.000.414	1.560.445	2.836.165	10.882.505
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2.863.858	-308.988	-1.057.794	-237.412	1.259.663
d. Kehutanan	2.978.951	-2.953.186	974.591	941.750	1.942.106
e. Perikanan	3.638.923	246.957	-213.891	-62.204	3.609.785
2. Pertambangan & Penggalian	33.083.244	-31.331.065	-3.537.270	-3.990.779	-5.775.870
a. Minyak dan Gas Bumi	31.019.585	-45.398.310	2.152.571	3.995.628	-8.230.526
b. Pertambangan tanpa Migas	1.047.386	204.840	-776.121	551.216	1.027.321
c. Penggalian	1.016.273	442.383	-32.986	1.665	1.427.335
3. Industri Pengolahan	26.409.460	-1.133.123	-14.692.110	3.837.154	14.421.380
a. Industri Migas	5.229.775	-6.737.038	-3.305.293	-130.079	-4.942.634
b. Industri Tanpa Migas	21.179.685	3.412.295	-7.581.224	2.353.259	19.364.014
4. Listrik, Gas & Air Bersih	540.030	259.015	76.649	-23.452	852.242
a. Listrik	404.700	123.260	165.348	-43.676	649.632
b. Gas	30.852	61.152	24.992	-17.235	99.760
c. Air Bersih	104.478	7.036	-10.677	2.012	102.849
5. Bangunan	5.537.097	2.396.010	78.426	-17.250	7.994.284
6. Perdag., Hotel & Restoran	16.031.738	3.761.368	5.533.659	-1.269.944	24.056.822
a. Perdagangan Besar & Eceran	14.801.062	3.748.339	3.620.292	-495.260	21.674.432
b. Hotel	231.390	58.801	1.906.869	-1.376.753	820.309
c. Restoran	999.287	115.840	1.264.754	-817.799	1.562.082
7. Pengangkutan & Komunikasi	5.841.706	11.107.132	-5.099.076	156.470	12.006.231
a. Pengangkutan	5.059.700	1.757.068	1.518.363	254.279	8.589.410
b. Komunikasi	782.006	4.598.403	-4.250.394	2.286.806	3.416.821
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	4.188.411	1.799.063	3.181.136	-1.936.313	7.232.297
a. Bank	1.115.043	20.972	7.651.691	-5.980.184	2.807.521
b. Lembaga Keuangan bukan Bank	298.922	283.263	-330.012	203.246	455.420
c. Jasa Penunjang Keuangan	10.702	3.671	43.494	-37.628	20.239
d. Sewa Bangunan	2.420.654	1.981.405	-1.301.624	235.201	3.335.636
e. Jasa Perusahaan	343.090	253.126	89.923	-72.658	613.481
9. Jasa-Jasa	9.622.282	-249.746	2.497.968	-499.653	11.370.850
a. Pemerintahan Umum	6.941.315	-4.203.830	4.923.068	384.073	8.044.627
b. Swasta	2.680.967	1.720.760	-2.242.190	1.166.687	3.326.224
Jumlah	128.832.031	-24.113.789	-6.649.378	-1.767.880	96.300.984

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2007 terjadi peningkatan PDRB sebesar 96,30 triliun rupiah di Pulau Sumatera. Berdasarkan hasil analisis SS-EM maka kenaikan PDRB ini didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu : sektor pertanian yang meningkat sebesar 24,14

triliyun rupiah, sektor perdagangan, hotel dan restoran yang meningkat sebesar 24,06 triliyun rupiah, sektor industri pengolahan yang meningkat sebesar 14,42 triliyun rupiah, serta sektor jasa-jasa yang meningkat sebesar 11,37 triliyun rupiah.

Jika dilihat per sub sektor maka peningkatan PDRB sebesar 96,30 triliyun ini tidak terlepas dari peran subsektor-subsektor yang dominan di Pulau Sumatera, yaitu subsektor perdagangan besar dan eceran yang meningkat sebesar 21,67 triliyun rupiah, subsektor industri tanpa migas yang meningkat sebesar 19,36 triliyun rupiah, dan subsektor tanaman perkebunan yang meningkat sebesar 10,88 triliyun rupiah.

Selanjutnya berdasarkan analisis SS-EM, maka peningkatan PDRB Pulau Sumatera sangat dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: dampak pertumbuhan ekonomi agregat PDRB Pulau Sumatera sebesar 128,83 triliyun rupiah, dampak pertumbuhan ekonomi sektoral di Nasional yang mampu mengakibatkan pertumbuhan negatif agregat PDRB Pulau Sumatera sebesar 24,11 triliyun rupiah, dampak keunggulan kompetitif yang memberikan pertumbuhan negatif ekonomi agregat Pulau Sumatera sebesar 6,65 triliyun rupiahserta dampak spesialisasi perekonomian di Pulau Sumatera yang mampu memberikan pertumbuhan negatif sebesar 1,77 triliyun rupiah.

4.2.1 Dampak Pertumbuhan Ekonomi Nasional terhadap Perekonomian Pulau Sumatera

Peningkatan kegiatan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan regional atau wilayah yang lebih luas (Sjafrizal, 2008). Kebijakan-

kebijakan ini secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak pada kinerja perekonomian daerah. Maka perkembangan perekonomian Nasional yang diindikasikan oleh laju pertumbuhan ekonomi akan berdampak bagi perkembangan perekonomian di Pulau Sumatera.

Tabel 4.5. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Nasional terhadap Peningkatan PDRB Pulau Sumatera Tahun 2000 dan 2007 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Nasional N_{ij}	Total Peningkatan PDRB D_{ij}	Pengaruh dampak luar (%)
1. Pertanian	27.578.064	24.142.748	114,23
a. Tanaman Bahan Makanan	9.610.024	6.448.689	149,02
b. Tanaman Perkebunan	8.486.308	10.882.505	77,98
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	2.863.858	1.259.663	227,35
d. Kehutanan	2.978.951	1.942.106	153,39
e. Perikanan	3.638.923	3.609.785	100,81
2. Pertambangan & Penggalian	33.083.244	-5.775.870	-572,78
a. Minyak dan Gas Bumi	31.019.585	-8.230.526	-376,88
b. Pertambangan tanpa Migas	1.047.386	1.027.321	101,95
c. Penggalian	1.016.273	1.427.335	71,20
3. Industri Pengolahan	26.409.460	14.421.380	183,13
a. Industri Migas	5.229.775	-4.942.634	-105,81
b. Industri Tanpa Migas	21.179.685	19.364.014	109,38
4. Listrik, Gas & Air Bersih	540.030	852.242	63,37
a. Listrik	404.700	649.632	62,30
b. Gas	30.852	99.760	30,93
c. Air Bersih	104.478	102.849	101,58
5. Bangunan	5.537.097	7.994.284	69,26
6. Perdag., Hotel & Restoran	16.031.738	24.056.822	66,64
a. Perdagangan Besar & Eceran	14.801.062	21.674.432	68,29
b. Hotel	231.390	820.309	28,21
c. Restoran	999.287	1.562.082	63,97
7. Pengangkutan & Komunikasi	5.841.706	12.006.231	48,66
a. Pengangkutan	5.059.700	8.589.410	58,91
b. Komunikasi	782.006	3.416.821	22,89
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	4.188.411	7.232.297	57,91
a. Bank	1.115.043	2.807.521	39,72
b. Lembaga Keuangan bukan Bank	298.922	455.420	65,64
c. Jasa Penunjang Keuangan	10.702	20.239	52,88
d. Sewa Bangunan	2.420.654	3.335.636	72,57
e. Jasa Perusahaan	343.090	613.481	55,93
9. Jasa-Jasa	9.622.282	11.370.850	84,62
a. Pemerintahan Umum	6.941.315	8.044.627	86,29
b. Swasta	2.680.967	3.326.224	80,60
Jumlah	128.832.031	96.300.984	133,78

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 4.5 memperlihatkan kinerja perekonomian nasional yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, memiliki kontribusi yang besar bagi kinerja perekonomian Pulau Sumatera. Secara riil, pertumbuhan eksternal ini

telah mengakibatkan peningkatan PDRB Pulau Sumatera sebesar 128,83 triliun rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa 133,78 persen peningkatan PDRB Pulau Sumatera disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian agregat nasional yang merupakan faktor eksternal dari Pulau Sumatera.

Secara sektoral, pengaruh perekonomian nasional terlihat kentara pada beberapa sektor, diantaranya adalah sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, yaitu sebesar 183,13 persen dan 114,23 persen. Dari sektor industri pengolahan, subsektor industri tanpa migas yang paling mendominasi yaitu sebesar 109,38 persen sedangkan subsektor industri migas memberikan pertumbuhan riil yang negatif sebesar 105,81 persen. Pada sektor pertanian, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya yang paling didominasi oleh komponen eksternal yaitu sebesar 227,35 persen, begitu juga pada subsektor kehutanan sebesar 153,39 persen dan subsektor perikanan sebesar 100,81 persen. Akibat dari pengaruh yang kuat terhadap subsektor sesungguhnya dapat meningkatkan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor pertanian di Pulau Sumatera sebesar 26,41 triliun rupiah dan 27,58 triliun rupiah namun secara riil sektor ini hanya mampu meningkat sebesar 14,42 triliun rupiah dan 24,14 triliun rupiah.

Pengaruh eksternal yang besar pada kegiatan sektor industri pengolahan dan sektor pertanian ini disebabkan kebijakan dari luar seperti kebijakan pemerintah pusat yang memberikan bantuan usaha kepada industri kecil dan menengah, subsidi pupuk, bibit unggul, pembukaan lahan perkebunan dan program-program lainnya yang mendukung kedua sektor ini. Dengan adanya

kebijakan eksternal ini yang digulirkan kepada seluruh wilayah Indonesia termasuk Pulau Sumatera, kedua sektor ini mampu memberikan pertumbuhan yang cukup besar di Pulau Sumatera.

Sedangkan pengaruh kebijakan nasional pada sektor pertambangan dan penggalian, diantaranya pajak ekspor pada beberapa bahan tambang dan galian seperti pajak ekspor batu bara, sampai sejauh ini memberikan pengaruh pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar minus 572,78 persen. Sehingga dengan adanya faktor luar PDRB, sektor ini dapat meningkat sebesar 33,08 triliun rupiah, namun riil nya kurang mampu memberikan pertumbuhan sebesar itu, bahkan menurunkan pertumbuhan sebesar 5,78 triliun rupiah.

Secara umum, membaiknya kondisi perekonomian nasional dalam kurun waktu 2000 sampai 2007 cukup mempengaruhi kinerja seluruh sektor-sektor di Pulau Sumatera. Beberapa sektor atau subsektor dipengaruhi secara signifikan, tetap ada juga yang terpengaruh tidak terlalu signifikan.

4.2.2 Dampak Bauran Industri Nasional terhadap Perekonomian di Pulau Sumatera

Dampak bauran industri atau struktur pertumbuhan ekonomi nasional berpengaruh secara negatif terhadap peningkatan PDRB di Pulau Sumatera. Dampak negatif bauran industri tersebut terjadi karena komposisi industri nasional yang ada sangat mempengaruhi laju pertumbuhan di Pulau Sumatera. Artinya, industri yang berlokasi di Pulau Sumatera termasuk ke dalam kelompok industri yang secara nasional kurang berkembang pesat dan bahwa struktur industri tersebut kurang cocok berlokasi di Pulau Sumatera.

Tabel 4.6. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Nasional terhadap Peningkatan PDRB Pulau Sumatera Tahun 2000 dan 2007 (juta rupiah)

Lapangan Usaha	Dampak Bauran Industri M _{ij}	Total Peningkatan PDRB D _{ij}	Pengaruh dampak luar (%)
1. Pertanian	-10.722.443	24.142.748	-44,41
a. Tanaman Bahan Makanan	-5.113.613	6.448.689	-79,30
b. Tanaman Perkebunan	-2.000.414	10.882.505	-18,38
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-308.988	1.259.663	-24,53
d. Kehutanan	-2.953.186	1.942.106	-152,06
e. Perikanan	246.957	3.609.785	6,84
2. Pertambangan & Penggalian	-31.331.065	-5.775.870	542,45
a. Minyak dan Gas Bumi	-45.398.310	-8.230.526	551,58
b. Pertambangan tanpa Migas	204.840	1.027.321	19,94
c. Penggalian	442.383	1.427.335	30,99
3. Industri Pengolahan	-1.133.123	14.421.380	-7,86
a. Industri Migas	-6.737.038	-4.942.634	136,30
b. Industri Tanpa Migas	3.412.295	19.364.014	17,62
4. Listrik, Gas & Air Bersih	259.015	852.242	30,39
a. Listrik	123.260	649.632	18,97
b. Gas	61.152	99.760	61,30
c. Air Bersih	7.036	102.849	6,84
5. Bangunan	2.396.010	7.994.284	29,97
6. Perdag., Hotel & Restoran	3.761.368	24.056.822	15,64
a. Perdagangan Besar & Eceran	3.748.339	21.674.432	17,29
b. Hotel	58.801	820.309	7,17
c. Restoran	115.840	1.562.082	7,42
7. Pengangkutan & Komunikasi	11.107.132	12.006.231	92,51
a. Pengangkutan	1.757.068	8.589.410	20,46
b. Komunikasi	4.598.403	3.416.821	134,58
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	1.799.063	7.232.297	24,88
a. Bank	20.972	2.807.521	0,75
b. Lembaga Keuangan bukan Bank	283.263	455.420	62,20
c. Jasa Penunjang Keuangan	3.671	20.239	18,14
d. Sewa Bangunan	1.981.405	3.335.636	59,40
e. Jasa Perusahaan	253.126	613.481	41,26
9. Jasa-Jasa	-249.746	11.370.850	-2,20
a. Pemerintahan Umum	-4.203.830	8.044.627	-52,26
b. Swasta	1.720.760	3.326.224	51,73
Jumlah	-24.113.789	96.300.984	-25,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Pada tabel 4.6 dapat dilihat akibat dampak bauran industri tersebut PDRB Pulau Sumatera menurun sebesar 24,11 triliun rupiah pada tahun 2007. Penurunan PDRB sebesar ini menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan ekonomi nasional justru melemahkan perekonomian di Pulau Sumatera yang sebesar 25,04 persen.

Sektor yang paling memperoleh imbas negatif bauran industri dari nasional adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor jasa. Sektor pertambangan dan

penggalan menurun sebesar 31,33 triliun rupiah, sektor pertanian menurun sebesar 10,72 triliun rupiah, sektor industri pengolahan menurun sebesar 1,13 triliun rupiah, dan sektor jasa turun sebesar 0,25 triliun rupiah.

Adapun sektor yang memperoleh imbas bauran industri positif yang sangat kuat adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 11,11 triliun rupiah, lalu diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, yaitu sebesar 3,76 triliun rupiah, sektor bangunan sebesar 2,40 triliun rupiah dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 1,80 triliun rupiah serta sektor listrik listrik, gas, dan air bersih sebesar 0,26 triliun rupiah.

4.2.3 Dampak Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi

Analisis *Shift Share Esteban Marquillas* dapat mendeteksi sektor dan subsektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi pada suatu wilayah. Sektor ekonomi dikatakan memiliki keunggulan kompetitif sekaligus spesialisasi jika pertumbuhan dan peranannya lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan dan peranan sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Tabel 4.7 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif sekaligus spesialisasi di Pulau Sumatera.

Jika dilihat dari subsektor ekonomi, hanya ada satu subsektor yang memiliki kedua hal tersebut, yaitu subsektor minyak dan gas bumi. Namun subsektor ini masih belum mampu memberikan kontribusi lebih untuk mengangkat keunggulan pada subsektor lainnya sehingga sektor pertambangan

dan penggalan masih belum mempunyai daya saing secara sektoral di Pulau Sumatera.

Tabel 4.7. Identifikasi Keunggulan Kompetitif dan Spesialisasi Perekonomian Pulau Sumatera Tahun 2000 dan 2007

Lapangan Usaha	$r_{ij} - r_{in}$	$E_{ij} - E_{ij}^*$	keunggulan Kompetitif	Spesialisasi
1. Pertanian	0,11	-24.142.748	ada	tidak
a. Tanaman Bahan Makanan	0,08	-6.448.689	ada	tidak
b. Tanaman Perkebunan	0,21	-10.882.505	ada	tidak
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	-0,19	-1.259.663	tidak	tidak
d. Kehutanan	0,27	-1.942.106	ada	tidak
e. Perikanan	-0,03	-3.609.785	tidak	tidak
2. Pertambangan & Penggalan	-0,09	5.775.870	tidak	ada
a. Minyak dan Gas Bumi	0,08	8.230.526	ada	ada
b. Pertambangan tanpa Migas	-0,09	-1.027.321	tidak	tidak
c. Penggalan	-0,01	-1.427.335	tidak	tidak
3. Industri Pengolahan	-0,17	-14.421.380	tidak	tidak
a. Industri Migas	-0,27	4.942.634	tidak	ada
b. Industri Tanpa Migas	-0,10	-19.364.014	tidak	tidak
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,04	-852.242	ada	tidak
a. Listrik	0,12	-649.632	ada	tidak
b. Gas	0,10	-99.760	ada	tidak
c. Air Bersih	-0,03	-102.849	tidak	tidak
5. Bangunan	0,00	-7.994.284	ada	tidak
6. Perdag., Hotel & Restoran	0,11	-24.056.822	ada	tidak
a. Perdagangan Besar & Eceran	0,09	-21.674.432	ada	tidak
b. Hotel	0,95	-820.309	ada	tidak
c. Restoran	0,18	-1.562.082	ada	tidak
7. Pengangkutan & Komunikasi	-0,35	-12.006.231	tidak	tidak
a. Pengangkutan	0,14	-8.589.410	ada	tidak
b. Komunikasi	-1,04	-3.416.821	tidak	tidak
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	0,12	-7.232.297	ada	tidak
a. Bank	0,62	-2.807.521	ada	tidak
b. Lembaga Keuangan bukan Bank	-0,18	-455.420	tidak	tidak
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,23	-20.239	ada	tidak
d. Sewa Bangunan	-0,18	-3.335.636	tidak	tidak
e. Jasa Perusahaan	0,02	-613.481	ada	tidak
9. Jasa-Jasa	0,09	-11.370.850	ada	tidak
a. Pemerintahan Umum	0,32	-8.044.627	ada	tidak
b. Swasta	-0,17	-3.326.224	tidak	tidak

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Jika dilihat satu per satu, maka sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif di Pulau Sumatera adalah sektor pertanian, sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor perdagangan hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan juga sektor jasa. Semua sektor ini mampu memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional.

Sedangkan spesialisasi di Pulau Sumatera hanya dimiliki oleh sektor pertambangan dan penggalian yang didukung oleh subsektor minyak dan gas bumi. Selain itu subsektor industri migas juga mempunyai spesialisasi di Pulau Sumatera. Hal ini menandakan bahwa sektor dan subsektor ini mampu memberikan peranan yang lebih besar dibandingkan tingkat nasional.

4.4 Analisis *Location Quotient*

Sektor unggulan daerah, pada dasarnya dapat memberikan kontribusi yang besar pada daerah, bukan hanya untuk daerah itu sendiri tapi juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lain. Dengan melihat data PDRB maka beberapa sektor unggulan daerah dapat diketahui. Alat analisis *Location Quotient* (LQ) ini digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif kegiatan ekonomi di Pulau Sumatera dengan membandingkannya terhadap Nasional.

Berdasarkan analisis LQ pada Tabel 4.8 maka di Pulau Sumatera terdapat dua sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Jika dilihat dari subsektor maka, maka keunggulan komparatif pada sektor pertanian sangat dipengaruhi oleh subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya, subsektor kehutanan, dan subsektor perikanan. Sedangkan pada sektor pertambangan dan penggalian, keunggulan komparatif pada sektor ini dipengaruhi oleh subsektor minyak dan gas bumi serta subsektor penggalian. Selain itu ada dua tambahan subsektor yang merupakan sektor basis, sedangkan sektornya belum mampu

untuk dikategorikan sebagai sektor basis, yaitu subsektor pengangkutan dan subsektor pemerintahan umum.

Tabel 4.8. Nilai Location Quotient Pulau Sumatera dirinci per sektor/subsektor ekonomi Tahun 2000-2007

Lapangan Usaha	Tahun								Rata2
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1. Pertanian	1,33	1,37	1,40	1,44	1,48	1,53	1,51	1,46	1,44
a. Tanaman Bahan Makanan	0,91	0,94	0,94	0,95	0,97	1,00	0,96	0,91	0,95
b. Tanaman Perkebunan	2,16	2,16	2,22	2,30	2,39	2,43	2,43	2,38	2,31
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1,19	1,24	1,22	1,24	1,20	1,16	1,10	1,01	1,17
d. Kehutanan	1,91	2,04	2,18	2,35	2,41	2,59	2,65	2,67	2,35
e. Perikanan	1,59	1,69	1,65	1,62	1,59	1,68	1,68	1,63	1,64
2. Pertambangan & Pengalihan	2,41	2,29	2,34	2,21	2,07	1,90	1,99	1,94	2,14
a. Minyak dan Gas Bumi	3,12	3,12	3,25	3,03	2,80	2,69	2,83	2,82	2,96
b. Pertambangan tanpa Migas	0,36	0,33	0,36	0,37	0,40	0,32	0,34	0,33	0,35
c. Pengalihan	1,21	1,21	1,25	1,23	1,30	1,26	1,32	1,25	1,25
3. Industri Pengolahan	0,64	0,70	0,72	0,73	0,75	0,72	0,70	0,77	0,72
a. Industri Migas	1,11	1,12	1,02	1,01	0,94	0,80	0,72	0,70	0,93
b. Industri Tanpa Migas	0,56	0,63	0,67	0,69	0,72	0,70	0,70	0,78	0,68
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,44	0,46	0,50	0,51	0,49	0,49	0,48	0,44	0,48
a. Listrik	0,40	0,42	0,45	0,47	0,45	0,44	0,43	0,42	0,44
b. Gas	0,30	0,41	0,55	0,56	0,52	0,58	0,60	0,32	0,48
c. Air Bersih	0,80	0,81	0,83	0,86	0,84	0,90	0,89	0,83	0,85
5. Bangunan	0,87	0,88	0,91	0,90	0,91	0,87	0,90	0,91	0,89
6. Perdag., Hotel & Restoran	0,73	0,76	0,75	0,74	0,74	0,78	0,77	0,73	0,75
a. Perdagangan Besar & Eceran	0,81	0,85	0,84	0,83	0,83	0,87	0,85	0,81	0,84
b. Hotel	0,31	0,31	0,35	0,33	0,36	0,48	0,51	0,50	0,39
c. Restoran	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,36	0,37	0,35	0,35
7. Pengangkutan & Komunikasi	0,93	0,94	0,95	0,94	0,93	0,94	0,96	0,99	0,95
a. Pengangkutan	1,01	1,04	1,06	1,05	1,04	1,04	1,06	1,05	1,04
b. Komunikasi	0,63	0,60	0,61	0,59	0,63	0,67	0,65	0,76	0,64
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	0,40	0,40	0,43	0,46	0,48	0,49	0,51	0,51	0,46
a. Bank	0,22	0,21	0,23	0,28	0,32	0,34	0,36	0,38	0,29
b. Lembaga Keuangan bukan Bank	0,36	0,37	0,39	0,37	0,38	0,39	0,36	0,34	0,37
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,17	0,17	0,18	0,16
d. Sewa Bangunan	0,86	0,88	0,92	0,91	0,91	0,91	0,93	0,90	0,90
e. Jasa Perusahaan	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
9. Jasa-Jasa	0,94	0,92	0,93	0,99	1,00	0,99	0,99	0,97	0,97
a. Pemerintahan Umum	1,16	1,12	1,14	1,28	1,28	1,27	1,29	1,27	1,23
b. Swasta	0,62	0,63	0,63	0,62	0,62	0,64	0,62	0,59	0,62

Sumber : Badan Pusat Statistik diolah

Semua sektor dan subsektor ini merupakan sektor basis yang menandakan Pulau Sumatera mampu memenuhi sendiri kebutuhannya di sektor dan subsektor ini, dan dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah. Kegiatan ekonomi pada sektor dan subsektor basis ini menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual keluar daerah yang meningkatkan pendapatan di

Pulau Sumatera, maka secara berantai akan meningkatkan investasi yang berarti menciptakan lapangan kerja baru.

Pada sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan dimungkinkan akan ada keterkaitan dengan sektor industri pengolahan, misalnya perkebunan kelapa sawit yang dapat menjadi bahan utama pada industri pengolahan CPO dan minyak goreng, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Begitu juga dengan sektor pertambangan dan penggalian yang dapat meningkatkan nilai tambah pada sektor industri pengolahan terutama subsektor minyak dan gas.

Sementara sektor lainnya mempunyai nilai LQ yang kurang dari 1 mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut bukanlah sektor basis di Pulau Sumatera. Ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang-barang pada sektor ini di Pulau Sumatera belum mampu dicukupi oleh produksi lokal, sehingga dimungkinkan untuk mengimpor dari daerah lain. Adapun sektor ekonomi yang bukan merupakan sektor basis adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa. Meski sektor-sektor tersebut bukan merupakan sektor basis, permintaan akan sektor dan subsektor ini akan naik dengan adanya peningkatan pendapatan pada sektor basis, sehingga sektor dan subsektor ini masih dapat berkembang.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Melalui analisis shift share modifikasi Esteban-Marquillas diperoleh bahwa subsektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi adalah subsektor minyak dan gas bumi.
2. Terdapat dua sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif di Pulau Sumatera, yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Kedua sektor ini merupakan sektor basis yang menandakan wilayah ini mampu memenuhi sendiri kebutuhannya disektor ini dan dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah. Sedangkan subsektor yang memiliki keunggulan subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya, subsektor kehutanan, subsektor perikanan, subsektor minyak dan gas bumi, subsektor penggalian dan subsektor pengangkutan serta subsektor pemerintahan umum.

5.2. Saran

1. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan sektor basis yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor unggulan daerah dalam mencanangkan pembangunan wilayah dengan tetap mengikutsertakan sektor non basis sebagai penunjang keberadaan sektor basis tersebut.

2. Saran penelitian selanjutnya perlu dilakukan pendekatan secara regional untuk menentukan aspek lokasi dimana sektor ekonomi unggulan akan dilaksanakan kegiatan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambardi, U.M dan Socia, P. 2002. "Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah". Pusat Pengkajian Kebijakan Pengembangan Wilayah (P2KTPW-BPPT), Jakarta.
- Arsyad, L. 1999. "Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah". BPFE, Yogyakarta.
- Budiharsono, S. 1995. "Perencanaan Pembangunan Daerah". PAU-EK-UI, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri, 2007. "Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah". Jakarta
- Dorodjatun, 2003. "Kata Sambutan Forum Pertemuan Gubernur Se-Wilayah Sumatera". Padang.
- Lembaga Administrasi Negara, 2007 "Metode Analisis Perencanaan : Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah". LAN, Jakarta.
- Muhammad, G. 2008. *Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur* [Skripsi]. IPB, Bogor.
- Rahardjo, A. 2008. "Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori". Graha Ilmu, Jakarta.
- Riyadi, D.S.2005. "Dampak Globalisasi Ekonomi dan Kebijakan Regionalisasi Terhadap Pengembangan Wilayah". (P2KTPW-BPPT), Jakarta.
- Setio, R. 2006. *Analisis Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian 30 Provinsi di Indonesia Tahun 1998 dan 2003* [Skripsi]. IPB, Bogor.
- Sjafrizal, 2008. "Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi". Baduose Media. Padang.
- Soepono, P.1993. "Analisis *Shiftshare*: Perkembangan dan Penerapannya", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Tarigan, R. 2007. "Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi". *Edisi Revisi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Todaro, M.P.2006. "Pembangunan Ekonomi". Erlangga, Jakarta.
- Yusuf, M. 1999. "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai salah satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, Aplikasi Model : Wilayah Bangka-Belitung". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Jakarta.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : PDRB Pulau Sumatera, Indonesia dan Provinsi Se-Sumatera Tahun 2000 Atas Dasar Harga Konstan 2000

LAPANGAN USAHA	TOTAL SUMATERA	INDONESIA	NAD	SUMUT	SUMBAR	RIAU	KEPULAUAN RIAU	JAMBI	SUMSEL	BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG
1. PERTANIAN	66.748.291,86	216.831.500,00	6.983.016,53	18.963.315,44	5.385.595,71	9.738.339,69	1.090.835,20	3.079.258,11	7.627.133,00	1.553.110,00	1.938.923,11	10.388.765,06
a. Tanaman Bahan Makanan	23.259.525,44	112.355.600,00	2.628.580,44	7.022.151,83	2.999.461,25	1.454.816,89	68.958,34	1.131.409,14	1.892.587,00	158.791,00	920.412,98	4.982.356,58
b. Tanaman Perkebunan	20.539.752,18	32.491.400,00	1.065.665,02	6.815.381,09	769.858,69	3.357.294,40	66.326,61	1.190.524,79	3.233.036,00	801.506,00	579.711,44	2.660.448,14
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	6.931.510,07	25.230.900,00	1.344.533,86	1.994.801,34	513.238,85	502.383,62	182.034,67	252.300,33	582.818,00	54.355,00	135.928,97	1.369.115,44
d. Kehutanan	7.210.073,35	16.343.000,00	909.006,61	940.864,24	456.794,44	3.551.026,89	16.241,17	366.596,35	778.737,00	51.395,00	91.921,60	47.490,06
e. Perikanan	8.807.430,81	30.410.600,00	1.035.230,60	2.190.116,95	646.242,48	872.817,89	757.274,42	138.427,51	1.139.955,00	487.063,00	210.948,11	1.329.354,85
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	80.072.699,36	167.692.200,00	12.225.498,88	1.314.347,67	873.887,57	44.739.938,97	5.090.331,81	1.192.253,67	13.011.087,00	859.711,00	162.012,05	603.630,74
a. Minyak dan Gas Bumi	75.077.944,15	117.156.000,00	12.059.033,33	977.446,86	0,00	44.578.901,59	4.869.162,98	1.138.018,39	11.124.840,00	0,00	0,00	330.541,00
b. Pertambangan tanpa Migas	2.535.029,95	38.990.300,00	0,00	0,00	228.787,92	0,00	125.663,53	0,00	1.385.737,00	658.577,00	136.121,82	142,67
c. Penggalian	2.459.725,27	11.545.900,00	166.465,55	336.900,81	645.099,65	161.037,38	95.505,30	54.235,28	500.510,00	201.134,00	25.890,23	272.947,07
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	63.919.872,46	385.597.900,00	9.758.464,20	16.926.777,44	3.218.470,01	6.151.885,32	14.381.448,01	1.408.195,81	7.209.728,00	1.558.687,00	194.132,67	3.112.084,00
a. Industri Migas	12.657.833,82	54.279.800,00	7.815.627,22	90.491,25	0,00	2.542.211,35	0,00	0,00	2.209.504,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas (**)	51.262.038,64	331.318.100,00	1.942.836,98	16.836.286,19	3.218.470,01	3.609.673,97	14.381.448,01	1.408.195,81	5.000.224,00	1.558.687,00	194.132,67	3.112.084,00
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.307.055,38	8.393.800,00	43.637,71	529.119,53	210.962,36	113.903,61	50.084,08	54.803,91	172.262,00	36.271,00	18.053,72	77.957,45
a. Listrik	979.511,07	5.932.800,00	39.442,03	337.405,09	187.089,81	92.733,49	40.363,87	44.953,25	138.697,00	35.131,00	8.226,78	55.468,76
b. Gas	74.671,23	1.072.300,00	0,00	74.383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	252.873,08	1.388.700,00	4.195,69	117.331,20	23.872,55	21.170,12	9.720,21	9.850,66	33.277,00	1.140,00	9.826,94	22.488,70
5. BANGUNAN	13.401.658,47	76.573.400,00	1.748.656,99	3.993.300,13	1.131.101,81	1.467.936,24	582.728,15	204.586,84	2.589.373,00	333.209,00	151.823,00	1.198.943,32
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	38.802.258,31	224.452.200,00	4.288.185,72	12.761.937,72	4.147.024,46	3.550.917,60	1.727.450,01	1.609.354,91	4.819.001,00	1.322.416,39	955.923,00	3.620.047,49
a. Perdagangan Besar & Eceran	35.823.601,99	184.969.900,00	4.181.097,13	11.403.855,45	3.996.430,41	3.433.332,44	1.498.723,40	1.451.543,23	4.433.820,00	1.234.509,39	895.738,00	3.294.552,53
b. Hotel	560.043,06	8.978.700,00	15.951,06	207.724,30	34.587,03	60.652,47	148.068,48	23.260,34	38.883,00	6.155,00	4.334,00	20.427,38
c. Restoran	2.418.613,26	30.503.600,00	91.137,53	1.150.357,96	116.007,02	56.932,69	80.658,13	134.551,34	346.298,00	81.752,00	55.851,00	305.067,58
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	14.138.914,47	65.012.100,00	1.268.469,58	4.400.380,42	2.650.332,56	1.167.928,55	689.414,28	749.595,10	1.317.334,00	205.330,00	413.797,45	1.276.332,53
a. Pengangkutan	12.246.194,53	46.751.800,00	1.045.748,67	3.833.120,76	2.272.443,92	1.065.742,80	607.395,12	702.836,92	1.066.212,00	181.700,00	393.249,45	1.077.744,89
b. Komunikasi	1.892.719,94	18.260.300,00	222.720,91	567.259,66	377.888,64	102.185,75	82.019,17	46.758,19	251.122,00	23.630,00	20.548,00	198.587,64
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	10.137.378,10	115.463.000,00	232.058,73	4.022.790,30	1.164.508,32	383.620,94	1.206.928,70	364.404,44	1.435.016,00	252.801,00	231.827,00	843.422,66
a. Bank	2.698.782,53	55.063.000,00	24.136,00	1.021.974,01	444.140,72	29.763,69	890.716,99	74.169,33	83.918,00	25.083,00	53.767,00	51.113,79
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	723.493,56	8.394.700,00	25.951,13	207.070,51	226.931,44	40.561,21	34.212,74	37.138,73	19.785,00	10.462,00	41.717,00	79.663,81
c. Jasa Penunjang Keuangan	25.902,00	856.000,00	0,00	24.152,34	0,00	0,00	0,00	1.502,66	247,00	0,00	0,00	0,00
d. Sewa Bangunan	5.858.804,75	31.871.900,00	169.719,41	2.257.381,34	458.305,05	280.525,15	275.377,71	241.959,46	1.177.447,00	203.745,00	111.593,00	682.751,63
e. Jasa Perusahaan	830.395,25	19.277.400,00	12.252,19	512.212,11	35.131,11	32.770,89	6.621,26	9.634,26	153.619,00	13.511,00	24.750,00	29.893,44
9. JASA-JASA	23.289.194,47	129.753.800,00	2.953.363,68	6.242.143,73	4.107.731,25	2.262.502,24	423.838,35	906.789,62	3.136.865,00	329.554,00	801.607,00	2.124.799,60
a. Pemerintahan Umum	16.800.343,67	69.460.200,00	2.753.720,32	3.958.175,02	2.897.126,04	1.758.825,80	186.484,79	760.870,95	1.994.080,00	179.249,00	584.998,00	1.726.813,75
b. Swasta	6.488.850,80	60.293.600,00	199.643,36	2.283.968,71	1.210.605,21	503.676,44	237.353,56	145.918,67	1.142.785,00	150.305,00	216.609,00	397.985,85
PDRB	311.817.322,87	1.389.769.900,00	39.501.352,02	69.154.112,38	22.889.614,05	69.576.973,15	25.243.058,61	9.569.242,41	41.317.799,00	6.451.089,39	4.868.099,00	23.245.982,85

Lampiran 2 : PDRB Pulau Sumatera, Indonesia dan Provinsi Se-Sumatera Tahun 2007 Atas Dasar Harga Konstan 2000

LAPANGAN USAHA	TOTAL SUMATERA	INDONESIA	NAD	SUMUT	SUMBAR	RIAU	KEPULAUAN RIAU	JAMBI	SUMSEL	BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG
1. PERTANIAN	66.748.291,86	216.831.500,00	8.212.758,21	23.856.154,64	8.038.919,12	14.785.911,40	1.639.450,05	4.437.448,46	11.113.699,00	2.202.057,54	2.770.377,84	13.834.263,35
a. Tanaman Bahan Makanan	23.259.525,44	112.355.600,00	3.449.345,65	7.912.652,26	4.030.223,74	1.768.512,67	84.416,31	1.618.932,67	2.632.452,00	265.858,41	1.252.344,89	6.693.475,64
b. Tanaman Perkebunan	20.539.752,18	32.491.400,00	1.634.025,06	9.561.602,40	2.024.582,65	5.622.057,76	85.805,82	2.072.372,66	5.183.054,00	1.110.622,12	894.282,86	3.233.852,15
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	6.931.510,07	25.230.900,00	1.206.148,33	2.503.265,37	630.975,89	751.979,61	254.372,50	299.188,43	816.210,00	68.902,00	201.840,20	1.458.290,96
d. Kehutanan	7.210.073,35	16.343.000,00	567.944,28	1.370.509,76	468.216,89	5.186.666,49	20.235,73	274.831,23	934.675,00	52.220,00	109.985,48	166.893,99
e. Perikanan	8.807.430,81	30.410.600,00	1.355.294,89	2.508.124,85	884.919,95	1.456.694,87	1.194.619,70	172.123,48	1.547.308,00	704.455,01	311.924,41	2.281.750,61
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	80.072.699,36	167.692.200,00	7.252.904,23	1.229.049,96	1.028.828,26	45.125.692,40	2.119.379,86	1.614.206,54	13.411.653,00	1.466.466,31	223.768,11	824.880,64
a. Minyak dan Gas Bumi	75.077.944,15	117.156.000,00	6.891.518,77	589.376,93	0,00	44.480.426,90	1.776.093,50	1.371.324,02	11.068.208,00	207.523,43	0,00	462.946,55
b. Pertambangan tanpa Migas	2.535.029,95	38.990.300,00	0,00	0,00	189.808,13	323.161,62	202.242,56	75.550,14	1.590.532,00	995.034,88	185.814,97	207,08
c. Penggalian	2.459.725,27	11.545.900,00	361.385,47	639.673,04	839.020,13	322.103,88	141.043,79	167.332,38	752.913,00	263.908,00	37.953,14	361.727,01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	63.919.872,46	385.597.900,00	4.491.750,51	23.615.200,05	4.209.069,41	9.246.973,72	18.224.975,92	1.948.460,26	9.801.804,94	2.126.364,88	285.545,90	4.391.106,85
a. Industri Migas	12.657.833,82	54.279.800,00	3.069.371,07	117.228,97	0,00	2.312.072,47	0,00	128.770,25	2.087.757,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas (**)	51.262.038,64	331.318.100,00	1.422.379,45	23.497.971,07	4.209.069,41	6.934.901,25	18.224.975,92	1.819.690,01	7.714.047,94	2.126.364,88	285.545,90	4.391.106,85
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.307.055,38	8.393.800,00	82.060,07	739.918,09	394.432,98	185.050,79	182.543,32	109.743,85	267.073,00	49.172,60	31.105,04	118.197,24
a. Listrik	979.511,07	5.932.800,00	77.694,95	502.523,96	357.568,62	157.539,15	67.157,04	91.246,91	214.667,00	47.998,00	12.820,95	99.926,87
b. Gas	74.671,23	1.072.300,00	0,00	63.328,96	0,00	0,00	102.437,60	0,00	8.665,10	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	252.873,08	1.388.700,00	4.365,12	174.065,16	36.864,36	27.511,65	12.948,68	18.496,94	43.740,90	1.174,60	18.284,09	18.270,36
5. BANGUNAN	13.401.658,47	76.573.400,00	2.225.132,15	6.559.295,79	1.627.195,26	2.674.930,31	1.137.241,64	654.223,43	4.157.657,00	543.724,94	206.421,18	1.610.120,72
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	38.802.258,31	224.452.200,00	5.579.994,74	18.386.279,50	6.056.682,55	6.840.260,85	7.710.139,76	2.464.612,40	7.567.159,00	1.823.414,10	1.432.886,83	4.997.650,90
a. Perdagangan Besar & Eceran	35.823.601,99	184.969.900,00	5.391.210,58	16.345.816,59	5.853.370,60	6.613.065,87	6.518.906,26	2.246.878,12	6.930.089,00	1.712.302,10	1.341.137,58	4.545.257,31
b. Hotel	560.043,06	8.978.700,00	18.443,90	276.085,43	51.743,58	115.369,99	791.318,65	30.227,92	56.227,00	7.966,00	7.156,35	25.812,76
c. Restoran	2.418.613,26	30.503.600,00	170.340,26	1.764.377,48	151.568,37	111.824,99	399.914,85	187.506,36	580.843,00	103.146,00	84.592,90	426.580,83
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	14.138.914,47	65.012.100,00	2.187.856,03	9.076.562,32	4.526.737,29	2.331.648,28	1.408.287,69	1.159.479,50	2.534.185,52	322.119,00	595.824,39	2.002.445,83
a. Pengangkutan	12.246.194,53	46.751.800,00	1.793.646,74	7.350.025,02	3.426.453,82	2.010.195,81	1.234.818,96	1.057.645,12	1.596.752,41	277.551,90	560.182,01	1.528.333,23
b. Komunikasi	1.892.719,94	18.260.300,00	394.209,29	1.726.537,29	1.100.283,47	321.452,47	173.468,73	101.834,38	937.433,10	44.567,10	35.642,38	474.112,60
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	10.137.378,10	115.463.000,00	547.352,59	6.720.615,60	1.692.546,42	1.011.841,54	1.580.890,66	609.271,18	2.197.304,66	320.154,09	325.360,24	2.364.338,27
a. Bank	2.698.782,53	55.063.000,00	248.010,89	1.745.108,40	589.907,71	320.483,32	1.058.019,70	217.916,68	163.219,81	32.815,58	76.230,78	1.054.591,00
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	723.493,56	8.394.700,00	33.981,68	347.387,62	408.224,41	72.074,44	57.745,14	43.081,62	27.934,44	12.210,24	55.060,81	121.212,91
c. Jasa Penunjang Keuangan	25.902,00	856.000,00	0,00	42.384,58	0,00	0,00	0,00	3.449,02	307,41	0,00	0,00	0,00
d. Jasa Bangunan	5.858.804,75	31.871.900,00	251.305,78	3.609.886,73	645.268,72	554.668,27	454.548,54	331.367,04	1.783.450,00	255.980,80	159.645,35	1.148.319,97
e. Jasa Perusahaan	830.395,25	19.277.400,00	14.054,24	975.848,27	49.145,58	64.615,51	10.577,28	13.456,81	222.393,00	19.147,47	34.423,30	40.214,39
9. JASA-JASA	23.289.194,47	129.753.800,00	5.246.814,40	9.609.197,33	5.338.557,30	4.010.950,18	710.904,73	1.277.715,71	4.211.579,00	611.588,60	1.137.675,03	2.505.062,57
a. Pemerintahan Umum	16.800.343,67	69.460.200,00	4.934.263,02	6.320.983,70	3.527.232,18	3.063.274,58	316.962,40	1.054.110,58	2.461.461,00	411.406,55	812.419,89	1.942.856,40
b. Swasta	6.488.850,80	60.293.600,00	312.551,39	3.288.213,64	1.811.325,11	947.675,60	393.942,33	223.605,13	1.750.118,00	200.182,05	325.255,14	562.206,16
PDRB	311.817.322,87	1.389.769.900,00	35.826.622,94	99.792.273,27	32.912.968,59	86.213.259,46	34.713.813,64	14.275.161,32	55.262.115,12	9.465.062,04	7.008.964,56	32.648.066,37

Lampiran 3 : PDRB Pulau Sumatera, Indonesia dan Provinsi Se-Sumatera Tahun 2007 Atas Dasar Harga Berlaku

LAPANGAN USAHA	TOTAL SUMATERA	INDONESIA	NAD	SUMUT	SUMBAR	RIAU	KEPULAUAN RIAU	JAMBI	SUMSEL	BANGKA BELITUNG	BENGKULU	LAMPUNG
1. PERTANIAN	182.711.778,83	547.235.600,00	20.203.246,78	41.010.151,99	14.754.867,69	43.595.169,01	2.612.093,12	8.366.857,99	20.080.335,30	3.390.453,34	5.130.322,61	23.568.281,00
a. Tanaman Bahan Makanan	53.274.422,87	268.124.400,00	7.729.092,99	14.220.957,48	7.489.661,97	2.437.302,65	133.975,65	2.907.933,07	5.113.040,00	797.593,20	2.361.652,89	10.083.212,98
b. Tanaman Perkebunan	67.103.721,84	84.459.200,00	4.279.345,68	17.272.712,21	3.353.780,05	22.257.311,01	158.801,89	3.925.311,35	8.504.812,80	1.257.500,71	1.445.802,27	4.648.343,87
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	14.804.166,72	62.095.800,00	2.892.120,43	3.645.810,20	1.206.850,05	1.198.936,50	402.464,52	461.420,19	1.543.626,00	92.656,17	420.939,78	2.939.342,88
d. Kehutanan	22.041.180,16	35.734.100,00	2.025.765,40	1.898.723,95	934.184,67	13.899.720,42	30.864,16	727.148,81	1.868.394,00	68.701,00	198.227,58	389.450,17
e. Perikanan	25.488.287,24	96.822.100,00	3.276.922,28	3.971.948,16	1.770.390,95	3.801.898,43	1.885.986,90	345.044,56	3.050.462,50	1.174.002,27	703.700,09	5.507.931,10
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	156.370.172,44	440.826.200,00	15.906.324,11	2.479.920,74	2.059.937,26	91.119.826,29	5.058.454,57	6.080.193,80	27.412.484,12	3.650.174,80	412.950,07	2.189.906,67
a. Minyak dan Gas Bumi	140.793.440,47	234.157.500,00	15.222.624,27	1.236.031,27	0,00	89.103.779,09	4.405.903,18	5.487.462,55	23.375.542,00	525.617,40	0,00	1.436.480,71
b. Pertambangan tanpa Migas	8.001.830,48	160.459.000,00	0,00	0,00	285.849,95	1.410.745,53	418.623,24	244.045,67	2.613.043,05	2.687.522,27	341.518,21	482,56
c. Penggalian	7.574.901,49	46.209.700,00	683.699,84	1.243.889,48	1.774.087,31	605.301,67	233.928,15	348.685,58	1.423.899,07	437.035,13	71.431,86	752.943,41
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	166.175.010,78	1.068.806.400,00	8.117.014,30	45.531.176,74	7.179.242,77	39.156.003,58	24.203.354,25	3.828.948,73	25.305.858,63	4.028.839,32	510.584,51	8.313.987,95
a. Industri Migas	22.492.117,82	182.296.300,00	6.334.532,74	283.318,53	0,00	3.863.797,55	0,00	395.574,00	11.614.895,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Tanpa Migas (**)	143.682.892,96	886.510.100,00	1.782.481,56	45.247.858,21	7.179.242,77	35.292.206,03	24.203.354,25	3.433.374,73	13.690.963,63	4.028.839,32	510.584,51	8.313.987,95
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	4.994.070,43	34.726.200,00	173.815,29	1.862.556,63	822.189,05	392.735,09	282.587,36	289.842,85	592.068,00	116.051,17	61.014,53	401.210,45
a. Listrik	3.794.009,92	23.070.800,00	166.354,87	1.182.467,37	756.759,22	314.804,19	126.206,50	238.324,98	494.578,00	114.439,79	27.821,46	372.253,55
b. Gas	411.717,13	6.894.400,00	0,00	265.960,15	0,00	0,00	123.798,98	0,00	21.958,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	788.343,38	4.761.000,00	7.460,42	414.129,12	65.429,83	77.930,90	32.581,88	51.517,88	75.532,00	1.611,38	33.193,07	28.956,89
5. BANGUNAN	41.504.965,99	305.215.700,00	5.612.482,00	10.168.464,65	3.290.146,38	7.043.077,64	2.651.119,55	1.472.471,96	6.742.083,29	1.051.120,69	394.942,65	3.079.057,18
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	111.160.290,36	590.822.300,00	9.088.070,28	34.996.207,69	10.367.999,17	14.064.410,65	10.632.966,10	4.773.912,39	12.919.871,58	3.104.854,62	2.548.022,69	8.663.975,17
a. Perdagangan Besar & Eceran	101.246.824,47	467.790.400,00	8.714.125,02	31.136.841,64	10.015.331,06	13.089.032,72	9.051.163,60	4.378.824,13	11.833.199,58	2.882.088,49	2.392.371,26	7.753.846,98
b. Hotel	2.436.410,46	17.431.700,00	48.384,88	511.072,10	93.062,13	586.083,53	985.700,99	51.243,58	90.713,00	11.911,58	14.227,96	44.010,71
c. Restoran	7.477.055,42	105.600.200,00	325.560,38	3.348.293,95	259.605,98	389.294,41	596.101,51	343.844,68	995.959,00	210.854,55	141.423,47	866.117,48
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	50.979.947,56	265.256.900,00	5.809.434,86	16.363.685,10	9.009.321,18	3.853.213,87	2.213.113,14	2.345.293,79	4.556.114,95	601.517,14	1.133.376,05	5.094.877,47
a. Pengangkutan	42.125.770,48	149.926.600,00	5.295.897,04	13.187.824,17	7.372.707,80	3.356.896,30	1.947.374,46	2.172.997,71	3.176.355,97	472.135,17	1.066.943,18	4.076.638,68
b. Komunikasi	8.854.177,08	115.330.300,00	513.537,82	3.175.860,93	1.636.613,38	496.317,58	265.738,68	172.296,08	1.379.758,99	129.381,97	66.432,87	1.018.238,79
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	8.821.838,98	0,00	506.158,79	3.175.860,93	1.636.613,38	496.317,58	265.738,68	169.201,57	1.365.880,99	124.496,70	63.331,59	1.018.238,79
a. Bank	32.338,09	0,00	7.379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,52	13.878,00	4.885,27	3.101,28	0,00
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	32.615.295,18	305.216.000,00	1.420.765,99	11.652.849,03	2.963.365,97	3.924.150,41	2.857.769,66	1.340.605,66	3.750.156,36	463.758,76	576.691,68	3.665.181,66
c. Jasa Penunjang Keuangan	10.480.761,92	105.536.800,00	613.149,00	2.959.354,82	925.267,34	2.068.992,84	1.940.376,07	433.461,32	221.251,00	48.464,87	137.469,65	1.132.975,00
d. Sewa Bangunan	2.230.023,75	32.584.000,00	43.534,83	622.277,77	744.010,38	257.051,89	94.485,41	110.264,72	55.622,00	17.523,32	89.757,65	195.495,78
e. Jasa Perusahaan	83.617,27	2.490.100,00	0,00	77.420,78	0,00	0,00	0,00	5.615,50	581,00	0,00	0,00	0,00
9. JASA-JASA	17.530.473,83	110.239.900,00	740.519,40	6.459.577,77	1.211.606,90	1.448.121,54	800.382,71	765.797,10	3.184.092,15	372.792,44	289.820,45	2.257.763,37
a. Pemerintahan Umum	2.290.418,41	54.365.200,00	23.562,76	1.534.217,90	82.481,36	149.984,14	22.525,46	25.467,02	288.610,21	24.978,13	59.643,93	78.947,50
b. Swasta	65.283.105,36	399.298.600,00	7.536.998,24	17.754.724,75	9.351.975,83	6.853.973,75	1.314.814,13	3.578.549,99	8.536.735,08	1.538.246,70	1.971.718,36	6.845.368,53
PDRB	47.563.595,98	205.343.900,00	6.440.747,29	11.337.108,46	6.416.216,34	5.111.541,73	631.054,01	3.066.490,59	6.138.385,00	1.236.376,77	1.409.272,63	5.776.403,15